

**KEBIJAKAN PUBLIK
SEKTOR OLAHRAGA
“Model Pembinaan Prestasi Panahan”**

**Hatta. M. Saleh
Andy Alfatih
Andries Lionardo
Raniasa Putra**



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

**Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KEBIJAKAN PUBLIK SEKTOR OLAHRAGA “Model Pembinaan Prestasi Panahan”

Penulis : Hatta. M. Saleh
Andy Alfatih
Andries Lionardo
Raniasa Putra
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **Noer Fikri Offset**
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp : (0711) 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Oktober 2022
16,25 x 25 cm
vi, 67 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN :

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya, kami dapat menyusun buku yang berjudul **“KEBIJAKAN PUBLIK SEKTOR OLAHRAGA : Model Pembinaan Prestasi Panahan”** pada akhirnya bisa kami selesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para guru dan para pembimbing yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan buku ini. Kemudian, buku ini berisi tentang analisis Pembinaan Prestasi Alet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan. Buku ini berisi pemaparan yang dilakukan oleh para narasumber yang diundang pada penelitian ilmiah. Hasil pemaparan tersebut lalu diolah menjadi sebuah analisis yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini membawa manfaat bagi para pembaca. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan, maka dari itu kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk kami selanjutnya.

Palembang, Oktober 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| | |
| BAB I. Kebijakan Sektor Olahraga Panahan | 1 |
| A. Motif | 1 |
| 1. Peralatan Panahan | 3 |
| 2. Atlet Panahan Sumsel Belum Pernah Juara di Tingkat Nasional | 4 |
| 3. Cabor Panahan Belum Masuk Sebagai Cabor Unggulan Daerah Sumsel | 6 |
| | |
| BAB II. Model-Model Teori Implementasi Kebijakan..... | 7 |
| A. Definisi Implementasi Kebijakan | 7 |
| B. Beberapa Teori Implementasi Kebijakan Publik..... | 10 |
| 1. Model Donal Van Metterdan Carl Van Horn | 10 |
| 2. Model Mazmanian dan Sabatier | 12 |
| 3. Model George C. Edward III | 15 |
| 4. Model Merilee S. Grindle | 17 |
| 5. Model Goggin, Bowman, dan Laster | 18 |
| 6. Model Ripley dan G. Franklin | 19 |
| | |
| BAB III. Perkembangan Olahraga Panahan | 21 |
| A. Sejarah Olahraga Panahan | 21 |
| B. Perkembangan Olahraga Panahan di Indonesia..... | 21 |
| | |
| BAB IV. Organisasi PERPANI..... | 23 |
| A. Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) | 23 |
| B. Profil Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan | 29 |
| 1. Visi dan Misi PERPANI Sumsel | 29 |
| 2. Tugas Pokok PERPANI Sumsel | 29 |
| 3. Kepengurusan Organisasi PERPANI Sumsel..... | 30 |
| 4. Sruktur Organisasi PERPANI Sumsel | 32 |

| | |
|---|---------------|
| BAB V. Proses Pembinaan Prestasi Atlet Panahan | 35 |
| A. Studi Kasus | 35 |
| 1. Dimensi Tingkat Kepatuhan | 35 |
| 2. Dimensi Kelancaran Rutinitas Fungsi | 42 |
| 3. Dimensi Kinerja dan Dampak Yang Diinginkan..... | 50 |
| BAB VI. Masa Depan Kebijakan PERPANI..... | 63 |
| Daftar Pustaka..... | 66 |

BAB I

KEBIJAKAN SEKTOR OLAHRAGA PANAHAN

A. Motif

Olahraga merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan manusia, baik secara fisik maupun mental. Olahraga merupakan segala bentuk aktivitas fisik yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk mendorong, membina dan mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial (Toho dan Ali, 2007: 2).

Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut prestasi olahraga. Untuk mendapatkan prestasi olahraga banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kondisi fisik, teknik, taktik dan mental.

Prestasi olahraga merupakan salah satu pencerminan suatu bangsa, prestasi olahraga dapat menjadikan nama bangsa dan negara menjadi harum di dunia sehingga meningkat pula martabat suatu bangsa. Sukses prestasi olahraga dipengaruhi oleh banyak faktor dan masing-masing faktor juga saling mempengaruhi sehingga menambah kompleksnya masalah prestasi dan pembinaan. Program utama untuk mencapai prestasi olahraga adalah mendapat atlet yang berbakat, melatih dengan pelatih yang kompeten, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, melalui pendekatan dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengelola organisasi yang sehat dan profesional.

Olahraga prestasi merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan dengan prestasi olahraga yang baik dapat dikatakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu Negara. Prestasi dalam bidang olahraga harus diprogramkan melalui program yang disusun sedemikian rupa. Pembinaan dilaksanakan harus berkesinambungan dan dalam waktu yang terprogram serta memiliki sasaran yang jelas. Dijelaskan pula komponen di dalam sistem pembinaan olahraga nasional adalah (1) tujuan, (2) manajemen, (3) faktor ketenagaan, (4) atlet, (5) sarana dan prasarana, (6) struktur dan isi program, (7) sumber belajar, (8) metodologi, (9) evaluasi dan penelitian, serta (10) dana (Harsuki, 2012: 37).

Undang-undang Sistem Keolahragaan No. 3 tahun 2005, menjelaskan bahwa pembinaan olahraga nasional di Indonesia dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu: (1) mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi, (2) induk organisasi cabang-cabang olahraga, (3) organisasi olahraga profesional, (4) organisasi olahraga yang ada di masyarakat. Identifikasi jalur itu juga berguna untuk mengenal kelompok khalayak sasaran dan memudahkan memobilisasi sumber-sumber daya untuk pembinaan (Wahjoedi, 2011: 45).

Mengacu pada turunan Undang-undang di atas, berlandaskan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (selanjutnya disebut OPUD) pada pasal 2 menerangkan bahwa Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi keolahragaan, pelaku olahraga, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan OPUD. Sehingga setiap daerah wajib melakukan pengelolaan yang terstruktur dan terencana berupa program pembinaan dan pengembangan atlet unggulan sehingga mampu berprestasi di tingkat daerah, provinsi, nasional hingga internasional.

Pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi dibantu Komite Olahraga Provinsi (KONI Pusat, 2013:18). Di mana KONI mempunyai fungsi memasyarakatkan olahraga prestasi yang dibina oleh anggotanya untuk mencapai prestasi olahraga yang maksimal. Fungsi organisasi ini adalah dalam membina dan mengembangkan kegiatan olahraga nasional mulai dari klub sebagai lapisan terbawah sampai ke tingkat pengurus besar sebagai lapisan teratas. KONI sebagai organisasi induk olahraga di Indonesia memiliki cabang organisasi di setiap daerah. Salah satunya adalah KONI Provinsi Sumatera Selatan. KONI Sumatera Selatan merupakan induk organisasi berbagai cabang olahraga yang ada di Sumatera Selatan. KONI Sumatera Selatan sebagai organisasi yang bergerak di bidang olahraga memiliki andil penting dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan olahraga di tingkat daerah yang kemudian mengoordinasikan semua pengurus daerah cabang-cabang olahraga tingkat kota, kabupaten dan provinsi serta berbagai klub olahraga kelas amatir hingga profesional di Sumatera Selatan.

Salah satu cabang olahraga prestasi yang sedang berkembang di Sumatera Selatan adalah Cabang Olahraga Panahan. Karakteristik olahraga panahan adalah melepaskan anak panah melalui lintasan tertentu menuju sasaran pada jarak tertentu. Teknik memanah yang tepat dan benar dapat menciptakan teknik memanah yang konsisten. Teknik memanah yang konsisten apabila dilakukan secara terus menerus, maka akan menghasilkan kemampuan teknik memanah yang baik yang berimplikasi pada prestasi dalam memanah.

Cabang olahraga panahan dewasa ini sudah berkembang pesat dan banyak di kenal oleh masyarakat Sumatera Selatan. Pada setiap tahun nya selalu diadakan *event* lomba panahan dengan berbagai kelas dan usia peserta. Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan sebagai induk organisasi olahraga panahan yang berwenang mengatur dan memberikan peran dalam meningkatkan prestasi atlet dari klub dan Pengcab/pengkab cabang olahraga panahan di seluruh wilayah provinsi Sumatera Selatan.

1. Peralatan Panahan

Peralatan merupakan suatu alat ayang dapat mendukung berjalannya pekerjaan. Peralatan pada umumnya lebih tahan lama dalam olahraga panahan, peralatan memiliki fungsi yang penting bagi atlet, alat-alat panahan yang biasa digunakan oleh para atlet panahan antara lain bantalan, target face, busur (*bow*), dan aksesoris tambahan lainnya.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang terkenal dengan daerah yang memiliki aset dan infrastruktur olahraga yang baik dan berkualitas. Sejak tahun 2011, provinsi ini telah membangun kawasan kompleks olahraga yang berstandar internasional yang bernama *Jakabaring Sport City* (JSC). PT Jakabaring Sport City (PT JSC) didirikan berdasarkan visi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat suatu kawasan olahraga yang modern bertaraf ineternasional serta berkarakter “*smart*” dan “*green*”.

Pembangunan kawasan *Jakabaring Sport City* (JSC) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, dimulai tahun 2001 dan berlanjut pada pelaksanaan PON tahun 2004 serta terus dikembangkan hingga pelaksanaan *Sea Games* tahun 2011, dan hingga *Asian Games* 2018. Pada mulanya pengelolaan Kawasan JSC berada dibawah dan

menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD), instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pada perkembangannya, efektifitas pengelolaannya dirasa perlu untuk ditingkatkan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berinisiatif untuk membentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah yang mandiri dan dapat mengelola Kawasan JSC secara profesional.

Namun, hal demikian tidak terdampak terhadap salah satu Cabang Olahraga (CABOR) yaitu olahraga panahan. Sarana berupa peralatan panahan yang dimiliki diketahui terdapat kekurangan jumlah yang digunakan untuk proses latihan para atlet. Hal ini sudah dilaporkan kepada KONI Sumatera Selatan melalui Pengurus PERPANI. Berikut adalah jumlah kekurangan peralatan panahan Sumsel, lihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Peralatan Atlet Panahan Sumsel

| No | Nama Alat | Jumlah (Unit) | Dibutuhkan |
|----|---------------------|---------------|------------|
| 1 | Bantalan | 5 | 20 |
| 2 | Target Face | 5 | 20 |
| 3 | Busur | 3 | 8 |
| 4 | Aksesoris penunjang | 7 | 15 |

Sumber : Data Primer 2021

Diketahui berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa masih kurang banyaknya peralatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan latihan atlet panahan di PERPANI Sumsel. Hal ini patut menjadi perhatian khusus dari pengurus PERPANI Sumsel untuk mempersiapkan alokasi dana dalam pengadaan peralatan atlet panahan Sumsel demi menunjang keberhasilan prestasi atlet panahan daerah Sumatera Selatan.

2. Atlet Panahan Sumsel Belum Pernah Juara di Tingkat Nasional

Pada penyelenggaraan PON sebelumnya yang dipertandingkan sejumlah tersebut dengan penambahan beberapa cabang olahraga eksibisi dari tuan rumah, selain memperkenalkan olahraga daerah tersebut juga dapat mendulang medali yang banyak pula. Pada cabang olahraga tersebut dibagi menjadi 2 cabang pula, yaitu cabang olahraga yang termasuk cabang olimpiade dan non olimpiade. Untuk cabang

olahraga yang termasuk dalam olimpiade disyaratkan untuk di gelar dikarenakan dapat memacu dan menimbulkan bibit atlit untuk bisa dan dapat meraih medali pada penyelenggaraan event olahraga yang lebih besar atau berskala internasional seperti SEA GAMES (*South East Asia Games*), ASIAN GAMES dan tentunya OLIMPIADE. Pada gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) ada beberapa cabang olahraga yang biasa di pertandingan, jumlahnya mencapai 44 (empat puluh empat) cabang olahraga. 44 cabang olahraga ini di atur dalam ketetapan KONI, termasuk diantaranya adalah cabang olaharaga panahan.

Sejak peralihan menuju abad milenium prestasi kontingen Cabang Olahraga Panahan Sumatera Selatan belum mampu berbicara banyak pada perhelatan tingkat nasional seperti kejuaraan PON ini. Hal ini sangat menjadi perhatian serius bagi PERPANI Sumsel yang mana proses pembinaan kepada atlet sudah dilakukan sejak tahun 2004 namun belum bisa memberikan prestasi cukup membanggakan untuk provinsi Sumatera Selatan.

Prestasi cabor Panahan masih kalah jauh dari prestasi cabor-cabor lainnya seperti anggar, atletik dan menembak. Berikut ini merupakan data komposisi kontingen Cabor Panahan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti PON XX tahun 2021 yang diselenggarakan di Provinsi Papua :

Tabel 1.2 Komposisi Kontingen Cabor Panahan Sumsel di PON XX Papua

| No | Cabor | Atlet | | Jumlah |
|----|----------|-------|--------|--------|
| | | Pria | Wanita | |
| 1 | Panahan | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Anggar | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Atletik | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Menembak | 8 | 2 | 10 |

Sumber : Data Primer 2021

Hasil dari tabel diatas menunjukkan atlet panahan PERPANI Provinsi Sumatera Selatan hanya dapat menyumbang 1 atlet saja yang mampu lolos dalam seleksi dan mengikuti Pelatihan Daerah (PELATDA) Provinsi Sumsel. Hal ini menjadi Pekerja Rumah (PR) yang harus di evaluasi oleh cabor PERPANI Sumsel agar kedepannya

mampu melahirkan dan mempersiapkan atlet yang bisa berprestasi di ajang nasional tingkat PON.

3. Cabor Panahan Belum Masuk Sebagai Cabor Unggulan Daerah Sumsel

Pembinaan dan pengembangan terhadap atlet dan cabor unggulan daerah di SUMSEL seharusnya selalu ada peningkatan seiring dengan penerapan berbagai perkembangan iptek dan infrastruktur yang berkualitas di bidang olahraga. Pembinaan dan pengembangan terhadap atlet dan cabor unggulan daerah akan sangat baik jika dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar atlet unggulan tersebut akan terus menjadi prestasi bagi suatu daerah.

Pencapaian Cabor Panahan Sumsel yang diraih pada perhelatan terakhir PON yang terakhir dilaksanakan di Provinsi Papua hanya mampu masuk 15 besar, masih kalah dari cabang olahraga yang mampu menyumbangkan medali emas yakni cabang olahraga Menembak, Ski Air dan Atletik. Dari dua ajang PON terakhir yang diselenggarakan cabang olahraga yang memiliki potensi untuk tetap meneruskan tradisi meraih medali emas yakni atletik, anggar, dan menembak.

Meskipun cabang olahraga lain juga dipertimbangkan untuk tetap ikut berkompetisi namun KONI Sumatera Selatan harus memfokuskan pada cabang olahraga yang akan merncapai target tertinggi yakni medali emas. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi PERPANI Sumatera Selatan karena cabor panahan sendiri belum masuk dalam kategori cabor unggulan daerah Sumsel. Dibutuhkan kerja keras dari semua unsur pengurus PERPANI Sumsel dan semua elemen agar pembinaan prestasi atlet panahan Sumsel menjadi lebih baik lagi. Berikut adalah daftar capaian atlet cabor panahan Provinsi Sumsel.

Tabel 1.3 Capaian Atlet Cabor Panahan Provinsi Sumsel

| No | Nama Atlet | Capaian |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | M. Kurniawan | 15 Besar (PON Papua) |
| 2 | Meizar Noor Rizal | Tingkat Provinsi |
| 3 | Riski Firdaus | Tingkat Provinsi |
| 4 | M. Ardan Nugroho | Tingkat Provinsi |

Sumber: Data Primer 2021

BAB II

MODEL-MODEL TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (Agustino,2006:138), yang menyatakan bahwa adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kederangannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Menurut Andy Alfatih (2010:15) mengemukakan implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut James P. Lester dan Joseph Stewart (Winarno,2002:102) mengemukakan Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Senada dengan pernyataan diatas, Mazmanian dan Sabatier (Agustino,2006:139) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya”.

Selain itu, menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno,2002:102) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Sedangkan menurut Merrile Grindle (Agustino,2006:139), yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J.O. Udoji (1981) dengan mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.

Sementara itu, menurut George C. Edward III (Winarno,2002:125) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu dilaksanakan dengan sangat baik. Sementara itu, kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Selanjutnya menurut Nugroho (2011:650) menyebutkan bahwa pada prinsipnya ada lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal ke efektifan suatu implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Tepat kebijakan, yang dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang

hendak dipecahkan. Selanjutnya adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter yang hendak dipecahkan, dan apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan karakter kebijakan tersebut.

- b. Tepat pelaksana, dalam implementasi kebijakan ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah-masyarakat/swasta atau kebijakan diswastakan (*privatisation or contracting out*).
- c. Tepat target, yang berkenaan dengan tiga hal, yaitu apakah target tidak tumpang tindih (*overlap*) atau bertentangan dengan kebijakan lain, apakah target siap untuk diintervensi atau dengan kata lain apakah target mendukung atau menolak kebijakan tersebut, dan apakah kebijakan yang dikeluarkan bersifat baru atau memperbaharui kebijakan sebelumnya.
- d. Tepat lingkungan, ada dua lingkungan yang menentukan dalam implementasi kebijakan yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternalkebijakan yang terdiri persepsi publik (*public opinion*) tentang kebijakan dan implementasinya, interpretasi (*interpretive institutions*) dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, dan individu-individu (*individuals*) yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan.
- e. Tepat proses, secara umum implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses yaitu pertama, *policy acceptance*, disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah *memahami* kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Kedua, *policy adoption*, disini public menerima kebijakan sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan dan pemerintah *menerima* kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Ketiga, *strategic readiness*, disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrat *on the street* siap menjadi pelaksana kebijakan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan pengertian bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber daya termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

B. Beberapa Teori Implementasi Kebijakan Publik

Berdasarkan studi kepustakaan terdapat beberapa teori implementasi kebijakan yang di sampaikan oleh para ahli, beberapa model tori implementasi kebijakan tersebut diantaranya adalah model implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, George Edward III, serta Merilee S. Grindle. Dibawah ini akan dipaparkan dan dijelaskan teori-teori implementasi dari beberapa ahli tersebut, berikut penjelasannya.

1. Model Donal Van Metter dan Carl Van Horn

Dalam Agustino (2008:141-144). Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio- kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implentasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja

implementasi kebijakn publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diatara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

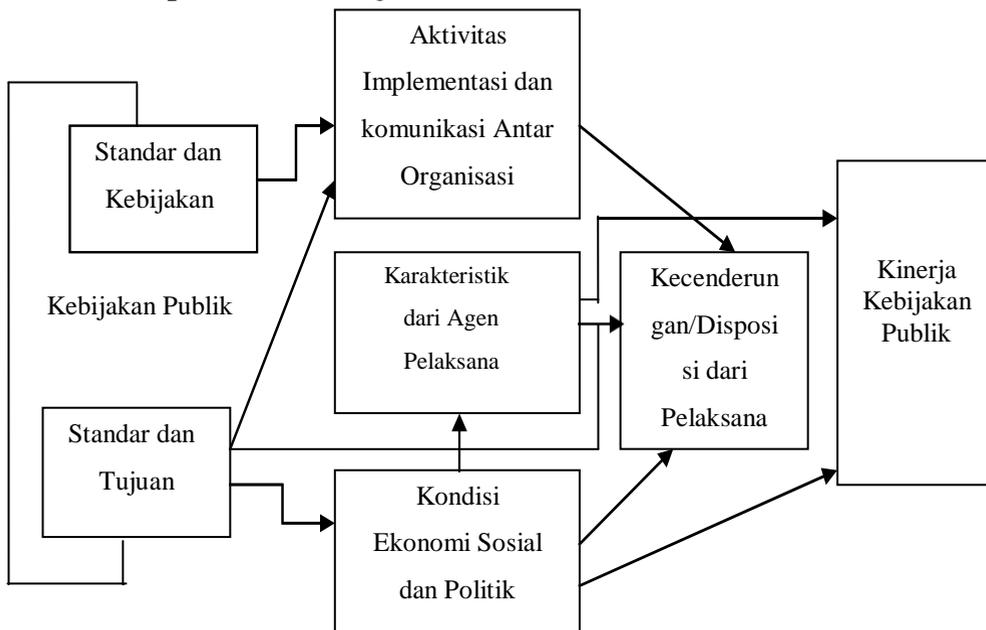
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Untuk menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Berikut model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn jika disajikan dalam bentuk gambar.

Gambar. 1

Model Implementasi Kebijakan Donal Van Metter dan Carl Van Horn



Sumber : Metter dan Horn (dalam Agustino,2008:144)

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Agustino (2008:144-149) disebut model kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for policy Implementation*). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting implementasi kebijakan public adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud di klasifikasikan mejadi tiga kategori dasar, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:

a) Kesukaran-kesukaran teknis.

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

b) Keberagaman perilaku yang diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.

c) Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya kan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan

d) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil.

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

a) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

b) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan.

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

c) Ketetapan alokasi sumber dana.

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

d) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

e) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

f) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaksud dalam undang-undang. Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan.

g) Akses formal pihak-pihak luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi.

3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi Implementasi.

a) Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang.

b) Dukungan publik.

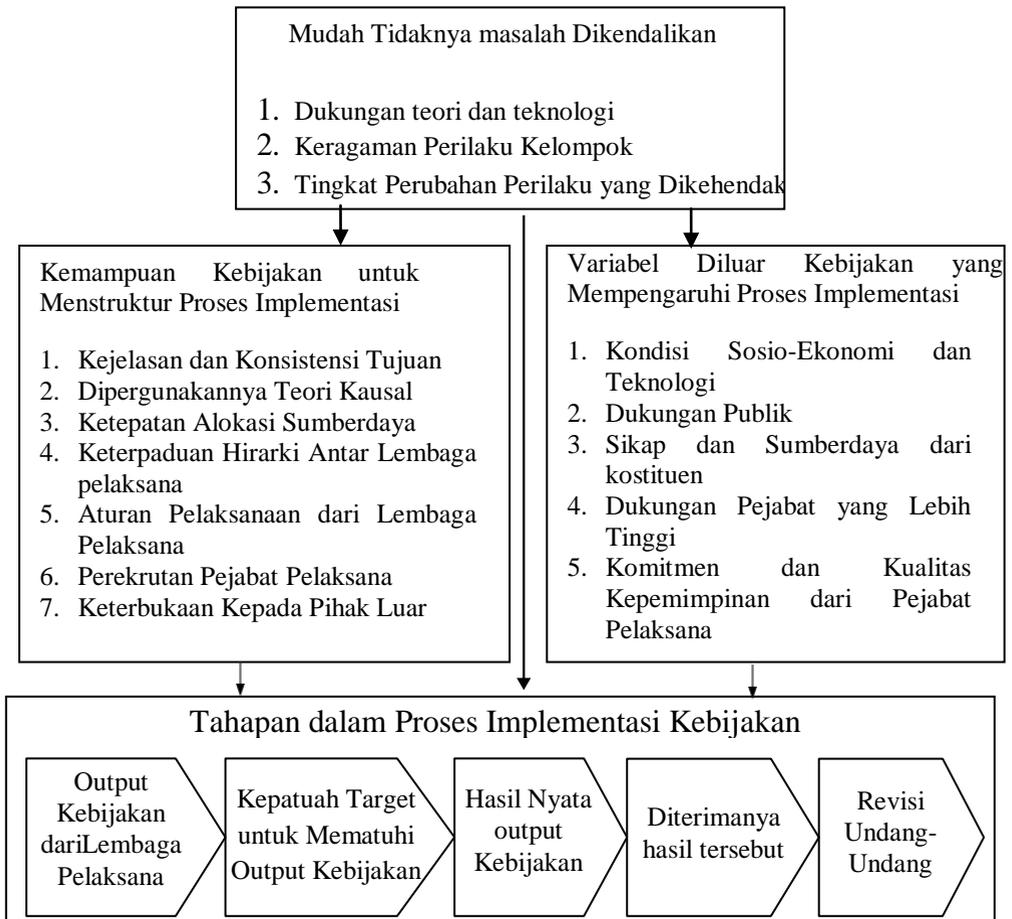
Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya dukungan dari warga.

- c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.
- d) Kesempatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana. Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula, kemampuan berinteraksi antarlembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukkseskan implementasi kebijakan menjadi hal indikasi penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.

Berikut ini penulis gambarkan model implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier.

Gambar. 2

Model implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier



Sumber : Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino,2008:149).

3. Model George C. Edward III

Model ini dinamakan sebagai model *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Model ini memiliki empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (dalam Agustino, 2008:149).

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah Komunikasi. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a. *Transmisi*, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. *Kejelasan*, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan.
- c. *Konsistensi*, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah Sumberdaya.

- a. *Staf*, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
- b. *Informasi*, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. *Wewenang*, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
- d. *Fasilitas*, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Varibel ketiga, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, menurut Edward adalah Disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting

ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III adalah :

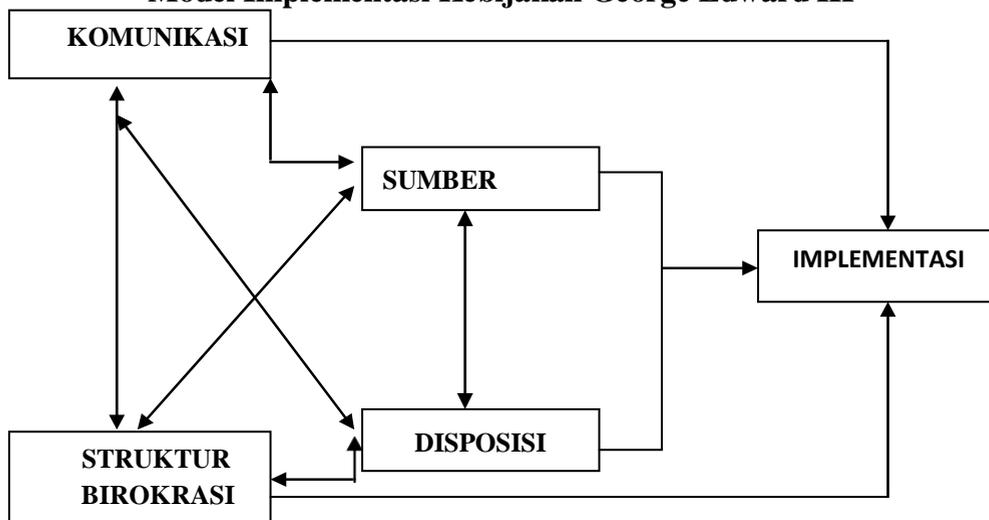
- a. *Pengangkatan birokrat*, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. *Insentif*, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

Variabel keempat menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah Struktur Birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tidak akan terlaksana karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah: melakukan *Standar Operating Procedures (SOPs)* dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Berikut model implementasi kebijakan Edward III yang disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut.

Gambar. 3
Model Implementasi Kebijakan George Edward III



Sumber : George Edward III (dalam Agustino,2008:150)

4. Model Merilee S. Grindle

Model Grindle ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya (dalam Nugroho,2011:634-635). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

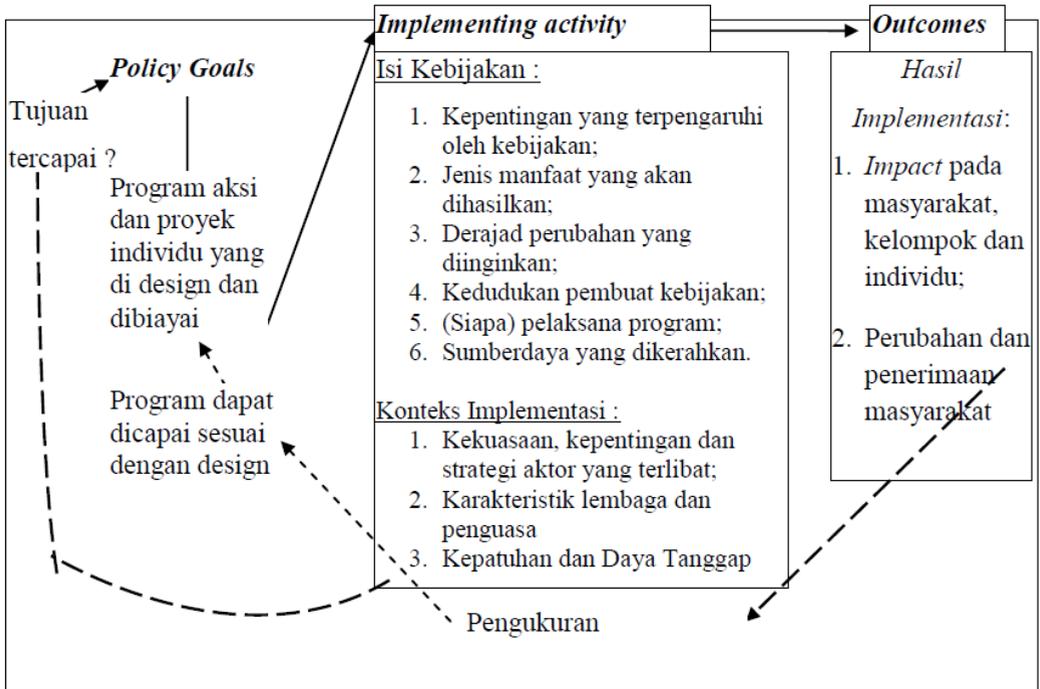
1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan diusulkan
3. Derajat perubahan yang di inginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksanaan program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Berikut model implementasi kebijakan Merilee S. Grindles yang disajikan dalam bentuk gambar 2.4 berikut.

Gambar. 4
Model implementasi kebijakan menurut Grindle



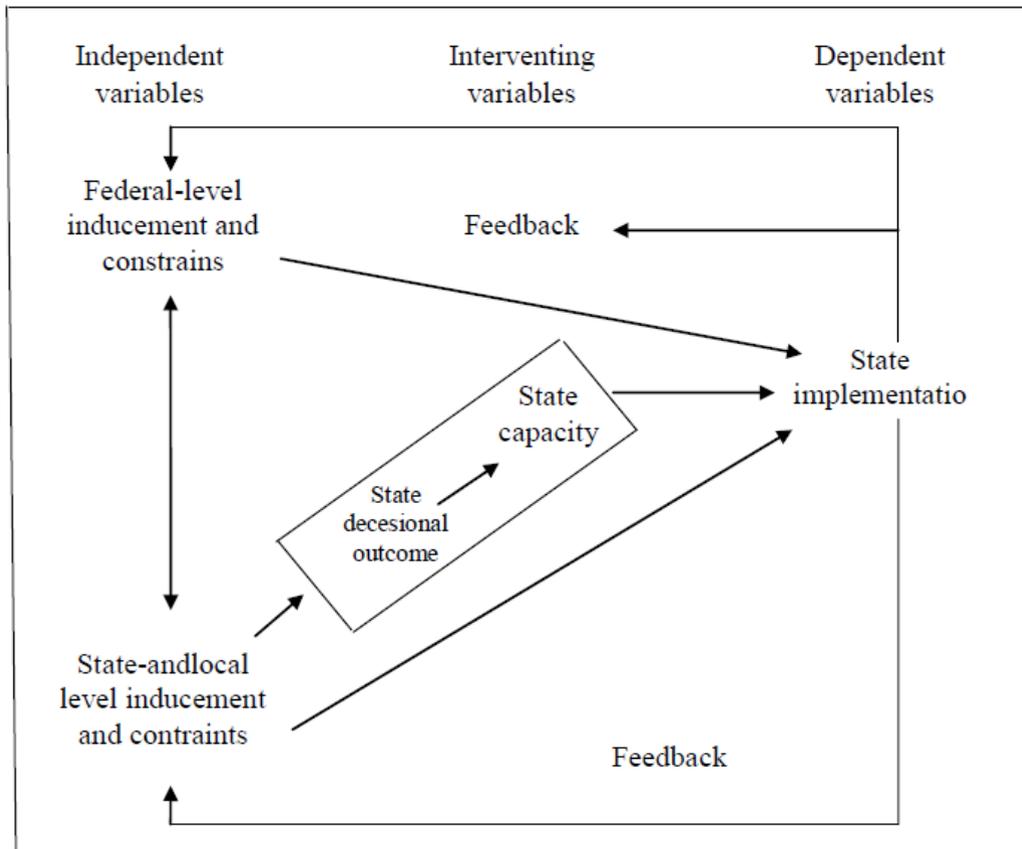
Sumber : Grindle (dalam Nugroho,2011:634-635)

5. Model Goggin, Bowman, dan Laster

Pendekatan model ini mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “*communication model*” untuk implementasi kebijakan (dalam Nugroho,2011:633). Goggin,dkk bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya, variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen*, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

Berikut model implementasi kebijakan menurut Goggin,dkk yang disajikan dalam bentuk gambar pada :

Gambar. 5
Model implementasi kebijakan menurut Goggin,dkk



Sumber: Goggin, dkk (dalam Nugroho, 2011:633)

6. Model Ripley dan G. Franklin

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi dalam buku yang berjudul Policy Implementation and Bureaucracy (1986), Randall B. Ripley dan Grace Franklin memberikan pandangan tentang faktor yang menentukan sebuah implementasi. Menurut Ripley dan Franklin ada tiga cara yang dominan digunakan dalam mencapai keberhasilan implementasi, sebagai berikut :

“There are three dominant ways of thinking about successful implementation. There are : First, some argue that success should be measured by the degree of compliance of the part bureaucratic underlings. A second perspective argues that successful implementation is characterized by smoothly functioning routines and the absence of problem. A third perspective, whice is that successful implementation

leads to desired performance in impact from whatever program (1986: 232-233).

Berdasarkan kutipan diatas dapat diketahui bahwa ada tiga cara yang dominan digunakan untuk mengukur suatu keberhasilan implementasi, yaitu :

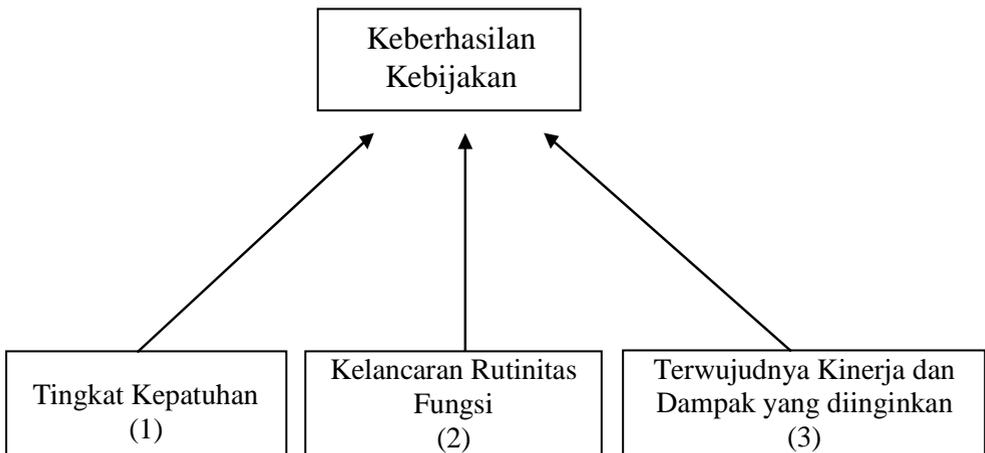
1. Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Kelancaran rutinitas fungsi.
3. Terwujudnya hasil dan dampak yang diinginkan.

Hal-hal yang harus diingat dalam proses implementasi kebijakan publik seperti yang diungkapkan Ripley dan G.Franklin (dalam Muluk 2007: 33) bahwa seringkali proses implementasi kebijakan bertalian erat dengan reformasi dan legitimitasi. Program yang telah ditetapkan secara nasional dalam proses pelaksanaannya memerlukan pembuatan keputusan lebih lanjut.

Pemikiran pokok implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin dapat digambarkan seperti pada gambar berikut :

Gambar. 6

Model implementasi kebijakan menurut Ripley and Franklin



Sumber : Ripley and Franklin (diadaptasi oleh penulis)

BAB III

PERKEMBANGAN OLAHRAGA PANAHAN

A. Sejarah Olahraga Panahan

Berbagai sumber menerangkan dengan sangat jelas jika kegiatan panahan ini bahkan telah ada sekitar 100 tahun yang lalu. Beberapa buku menggambarkan para manusia purbakala menggunakan busur dan panah untuk berburu mangsa demi mempertahankan hidup.

Suku Neanderthal dipercaya sebagai salah satu suku zaman purbakala yang telah menggunakan busur dan panah untuk bertahan hidup. Para ahli purbakala saat melakukan penggalian di daerah Mesir juga menemukan bukti adanya unsur kegiatan panahan ini saat melihat tubuh seorang prajurit yang terkena panah.

Data-data dari para ahli sejarah juga menjelaskan jika beratus-ratus tahun silam, busur dan panah juga telah menjadi alat perang atau senjata para umat manusia. Ada beberapa teori pula yang mengemukakan jika panah dan busur sudah mulai dipakai di masa peradaban manusia sejak era mesolitik. Era itu diperkirakan berlangsung sekitar 5000 hingga 7000 tahun yang silam.

Kemudian, teori lain menyebutkan jika kegiatan panahan tersebut muncul lebih awal dari teori yang disebutkan sebelumnya. Teori yang kedua ini meyakini jika kegiatan panahan ini sudah muncul pada era paleolitik yang terjadi sekitar tahun 10.000 hingga 15.000 tahun yang lalu.

Terlepas dari semua teori tersebut, kegiatan panahan ini memang telah melalui proses yang sangat panjang. Panahan yang dulunya dikenal sebagai kegiatan berburu yang dilakukan oleh manusia purbakala, kini telah berubah menjadi salah satu cabang olahraga penting di Olimpiade. Yang awalnya digunakan untuk bertahan hidup dan berperang melawan suatu negara, kini telah berubah peran sebagai sarana hiburan yang bisa memunculkan prestasi dalam setiap ajang panahan.

B. Perkembangan Olahraga Panahan di Indonesia

Sejarah munculnya olahraga panahan di Indonesia juga belum diketahui secara pasti mengenai kapan dan di mana olahraga ini hadir untuk pertama kalinya. Namun, jika melihat berbagai cerita-cerita rakyat terdahulu, berbagai tokoh dalam kisah tersebut digambarkan

telah menggunakan busur dan panah. Sebut saja Arjuna, Sumantri, Ekalaya, Dipati Karno, dan juga Srikandi. Para tokoh-tokoh ini terkenal dengan senjata panah dan busurnya dalam cerita.

Dalam sejarah PON, cabang olahraga panahan sering dimasukkan sebagai jenis olahraga yang diperlombakan. Kemudian, dari catatan sejarah panahan di Indonesia, olahraga panahan ini memiliki sebuah organisasi yang disebut dengan Persatuan Panahan Indonesia atau disingkat dengan sebutan Perpani.

Persatuan Panahan Indonesia ini baru terbentuk pada tanggal 12 Juli 1953 di kota Yogyakarta. Pioner dari organisasi ini adalah Sri Paku Alam VIII. Sri Paku Alam VIII juga menjabat sebagai ketua umum Perpani selama 24 tahun yakni sekitar tahun 1953 hingga tahun 1977. Setelah terbentuk dan berkembangnya organisasi Perpani, berbagai pihak pun mengambil langkah untuk ikut bergabung dengan anggota FITA (*Federation Internationale de Tir A L'Arch*). Indonesia akhirnya resmi bergabung dengan FITA sekitar tahun 1959 di Oslo, Norwegia.

Seiring berkembangnya panahan di tanah air, olahraga ini pun mulai mendapat tempat di kehidupan masyarakat tanah air. Berbagai kota sudah mengenal dan mulai memainkan olahraga panahan. Berbagai perlombaan tingkat daerah dan nasional mulai sering digelar. Tak hanya itu, Perpani juga mulai sering mengirimkan atlet-atlet panahannya untuk mengikuti kejuaraan panahan tingkat dunia. Untuk pertama kalinya juga mencatat prestasi yang luar biasa pada *Olympic Games* di tahun 1988 yang bertempat di Seoul. Saat itu, tim putri Indonesia berhasil meraih medali perak untuk pertama kalinya di ajang internasional.

BAB IV

ORGANISASI PERPANI

A. Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)

Perpani terbentuk pada tanggal 12 Juli 1953 di Yogyakarta atas prakarsa Sri Paku Alam VIII dan beliau menjabat sebagai Ketua Umum Perpani selama dua puluh empat tahun, dari tahun 1953 sampai dengan 1977. Indonesia menjadi anggota FITA (*Federation International de Tir A L'arhc*) pada tahun 1959 dalam kongres di Oslo, Norwegia.

Perlu dikemukakan disini bahwa sebelum tahun 1959 yaitu tahun diterimanya Perpani sebagai anggota FITA, pada PON – I tahun 1948 di Solo, PON II/1951 di Jakarta, PON – III/1953 di Medan, PON – IV/1957 di Makasar, panahan hanya memperlombakan Ronde Tradisional, yaitu ronde duduk, dengan hanya satu jarak 30 meter, dengan 48 tambahan 4 anak panah dan dengan sasaran bulatan dengan hanya dibagi tiga bagian saja.

Selanjutnya beberapa kejadian penting yang dapat dikemukakan mengenai dunia Panahan Indonesia, antara lain :

- Tahun 1959 : Kejuaraan Nasional I di Surabaya.
- Tahun 1961 : Kejuaraan Nasional II di Yogyakarta.
- Tahun 1962 : Kejuaraan Nasional III di Jakarta
- Asian Games IV di Jakarta, dimana regu Panahan Indonesia menduduki tempat kedua di bawah Jepang.
- Tahun 1963 : Kejuaraan Nasional IV di Jakarta.
- Genefo I di Jakarta, dimana regu Indonesia (Putera) menduduki tempat keempat dan regu puterinya kedua.
- Tahun 1964 : Perlawanan regu Nasional ke RRC dan Philipina. Selama di RRC pemanah-pemanah pria kita dalam tiga pertandingan menduduki tempat teratas. Sedangkan puteri kita masih harus mengakui keunggulan pemanah-pemanah puteri RRC. Di Philipina sebaliknya pemanah-pemanah tuan rumah, sedang pemanah puteri kita unggul dari pemanah-pemanah Philipina.
- Tahun 1965 : Kejuaraan Dunia di Vesteras, Swedia, dimana regu puteri Indonesia ketiga belas dan regu puteri kesembilan terbaik di dunia.
- Tahun 1966 : Ganefo Asia I di Phnom Penh, Kamboja. Regu putera menempati urutan teratas, dan dua orang kita berhasil merebut

medali emas dan perak untuk kejuaraan perorangan. Regu puteri kita menduduki tempat kedua di bawah RRC.

Untuk selanjutnya, perkembangan dan prestasi Panahan Indonesia tidak mengecewakan. Kejuaraan Nasional selalu diselenggarakan setiap tahun, yaitu tahun genap untuk Ronde Perpani dan Ronde Tradisional, sedang pada tahun ganjil untuk Ronde FITA (sejak tahun 1982 Kejuaraan Nasional diselenggarakan setiap tahun untuk ketiga ronde Panahan yaitu Ronde FITA, Ronde Perpani dan Ronde Tradisional sekaligus).

Demikian pula Perpani selalu berusaha dan berhasil mengikuti kejuaraan-kejuaraan Dunia, walaupun hasilnya masih di bawah pemanah-pemanah Asia masih menempati urutan teratas. Juga pada pertandingan-pertandingan Internasional lainnya seperti *Asian Games*, *SEA Games*, *Asian Meeting Championships*, *Asia Oceania Target Archery Championships*, Perpani selalu ikut mengambil bagian.

Demikianlah perkembangan Panahan dan Perpani sampai saat ini, dimana cabang Panahan termasuk di dalam cabang yang diprioritaskan, bahkan termasuk cabang super-prioritas, di dalam persiapan menghadapi *Asian Games XIII/1986* di Seoul – Korea Selatan. Hal ini tentunya karena prestasi cabang Panahan yang telah dicapai selama ini. Berikut adalah gambar atau logo dari organisasi Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI).

Gambar 4.1 Logo PERPANI



Sumber : Profil PB PERPANI, 2022

Perlu dicatat bahwa dalam forum *Olympic Games* pun Panahan telah ikut berbicara, walaupun pihak Pemerintah selalu mengirimkan pemanah-pemanah kita dalam jumlah yang minim, yaitu satu putera dan satu puteri. Tetapi sejarah telah mencatat bahwa pada *Olympic Games* tahun 1976 di Montreal – Kanada pemanah puteri kita yaitu Leane Suniar berhasil menempati urutan kesembilan dan pada *Olympic Games* Tahun 1988 di Seoul – Korea Selatan, pemanah team puteri kita berhasil menempati urutan kedua dan pertama kalinya Indonesia mendapat perak di arena yang bertaraf Internasional. Suatu prestasi yang sangat membanggakan.

Pada masa ini, pengurus besar organisasi PERPANI telah mencoba melakukan pengembangan manajemen organisasi yang baik. Berikut adalah pengurus besar Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI Pusat) masa bakti 2020-2022 :

Tabel 4.1 Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB PERPANI) Masa Bakti 2020-2022

| JABATAN | NAMA |
|---------------|---|
| PELINDUNG | <ul style="list-style-type: none"> • MENPORA • MENKOKESAR • MENDIKBUD • MENBUDPAR • MENKES • MENAG • PANGLIMA TNI • KAPOLRI • KEJAGUNG • KETUA KONI PUSAT • KETUA KOI |
| DEWAN PEMBINA | <ul style="list-style-type: none"> • Dr. H.C Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla • Dr. H. C Ir. H. Suharso Monoafa • Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D • H. Anies Rasyid Baswedan, SE., M.PP., Ph.D • Surya Dharma Paloh, S.Sos • Sofjan Wanandi • Dr, Sofyan A. Djalil, SH., MA., |

| | |
|------------------|---|
| | <p>M.ALD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tjahjo Kumolo, SH • Nadiem Anar Makarim, B.A., M.BA • Ir. H. Nova Iriansyah, M.T • Drs. H. Zianut Tauhit Sa'adi • H. Syaiful Huda • Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP • H. Teuku Riefky Harsya, MT • H. Muhammad Nasir Djail, S.Ag., M.Si • Dr. Muhammad Kadafi, SH., MH |
| DEWAN KEHORMATAN | <ul style="list-style-type: none"> • Oetojo Usman • Hayono Isman • Taufik Efendi • Siti Hediati Soeharto • Kelik Wirawan W. Widodo |
| DEWAN PENASEHAT | <ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. C Ary Ginanjar Agustian • Komjen (Purn) Drs. Nanan Soekarna • Dede Yusuf M.E, ST, M.Si. Pol • Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin • Dr. H. M. Amir Uskara. M.Kes • H. Ach. Baidowi, S.Sos • H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS • H. Mahfudin Nigara, SE., MM • Letjen (Purn) TNI Agus Surya Bakti, M.I.Kom • Letjen TNI Tatang Sulaiman • Letjen (Purn) TNI Mar Muhammad Alfa Baharuddin • Laksmana (Purn) Dr. H. Ade Supandi, SE., M.AP • Brigjen Polisi Drs. Sumadi M.Si • Dr. Ir. H. Tarmizi Karim, M.Sc • Dr. Ir. H. Surya Dharma • KH. Muhammad Cholis Nafis, Lc., MA., Ph.D • dr. Sofyan Tan |
| DEWAN PAKAR | <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr.Phil. Yanuar Kiram |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Drs. Harsono, M.Sc • Tomoko Suzuki • Densi Purna Irawan • Dr. Burhanuddin Luthfi, M.Pd • H. Ade Supriyadi • Tony Fransye Kullit • Dewi Asmara Oetojo Usman • Drs. Asep Gumilar • I Gusti MA Wisnu Mataram • Dr. Mugiyo Hartono, M.Pd |
| DEWAN PENGAWAS | <ul style="list-style-type: none"> • H. M. Husni, SE • Hj. Desy Ratnasari, M.Psi, M.Si • Elly Rachmat Yasin • H. Ilmiza Sa'aduddin Djamal • H. Mussanif, SE • Drs. Azwar Thain, M.Si |
| Ketua Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Illiza Sa'aduddin Djamal, SE |
| Ketua Harian | <ul style="list-style-type: none"> • Ir. Muhammad Hasanuddin Thoyieb, MM |
| Wakil Ketua I Bid. Organisasi | <ul style="list-style-type: none"> • Sony Gatot Hariyanto, SH |
| Wakil Ketua II Bid. Pembinaan | <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Alman Hudri, M.Pd |
| Wakil Ketua III Perencanaan dan Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> • H. Rudy Mas'ud , SE |
| Wakil Ketua IV Hukum, Humas dan Promosi | <ul style="list-style-type: none"> • M. Ikhsan Ingratubun, SE, SH |
| Sekretaris Jendral | <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Nyak Amir, M.Pd |
| Wakil Sekretaris Jendral | <ul style="list-style-type: none"> • Ary Koeswiranto, SE |
| Bendahara Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Ir. Izzu Farhan Fajri, M.Sc |
| Wakil Bendahara Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Rio Parnando, SE, M.Kom |
| Kabiro Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Ir. Denvinal, MM, MBA |
| Wakabid Biro Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Marius Budiono |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Imam Santosa • Bayu Adi P • M. Rajab Indra Hakim Hasibuan , B.Ba.Tpt & Logs (Hons) |
| Kabiro Humas dan Promosi | <ul style="list-style-type: none"> • Asril Sadikin |
| Wakabid Humas dan Promosi | <ul style="list-style-type: none"> • Frans Watu |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Laras Susyanto • Imam Priyono, SY, MM • Commotio Daulay |

| | |
|---|--|
| Kabid Organisasi Daerah dan Luar Negeri | <ul style="list-style-type: none"> • Hengky Fredy Saaki, SE |
| Wakabid Organisasi | <ul style="list-style-type: none"> • Infithar Fajar Putra, SE.Ak., SH |
| Wakabid Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Deni Arisandi, M.g |
| Wakabid Hubungan Luar Negeri | <ul style="list-style-type: none"> • Stevanus Grandy |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Branjangan |
| Kabid Pembinaan Prestasi dan Tim Nasional | <ul style="list-style-type: none"> • Kolonel Infanteri Wawan Erawan, SE |
| Wakabid Pembinaan Prestasi | <ul style="list-style-type: none"> • Jimmy Lantang |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Indrie HP Kuntjoro • Wahyu Hidayat |
| Wakabid Tim Nasional | <ul style="list-style-type: none"> • Iskandarsyah Ramdhan Datau |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • dr. Leane S. Manurung |
| Wakabid Kemaslahatan | <ul style="list-style-type: none"> • Defrizal, S.Pd, M.Pd |
| Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Pembibitan | <ul style="list-style-type: none"> • Wiryawan Richard Yohanes |
| Wakabid Pembibitan dan Pelatihan | <ul style="list-style-type: none"> • Nurfitriyana Saiman |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Puryoto • Yohana Citra Mahardika |
| Wakabid Pembibitan dan Pemanduan Bakat | <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Saifuddin, M.Pd |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Saraswati, S.Pd • Unggul Broto Warastro, S.Pd |
| Kabid Data dan Analisa Statistik Prestasi Atlet | <ul style="list-style-type: none"> • Prof. dr. Firmansyah Dlis, M.Pd |
| Wakabid Data dan Analisa Statistik Prestasi Atlet | <ul style="list-style-type: none"> • H. Suherman, SE, MM |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Dedy Triharjanto, SE, MM • Zefelia Oesman |
| Kabid Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • dr. Wanarani Aries, SpKFR (K) |
| Wakabid Psikologi Olahraga | <ul style="list-style-type: none"> • Yuanita Nasution |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Kolonel (Purn) Dr. Ahmad Husein, S.MA |
| Kabid Perwasitan, Perlombaan dan Peralatan | <ul style="list-style-type: none"> • Ibnu Marwata |
| Wakabid Perwasitan | <ul style="list-style-type: none"> • Reno Sagita |
| Wa kabid Perlombaan | <ul style="list-style-type: none"> • Ari Acharia Pratama Putra, S.Pd |
| Wakabid Peralatan dan Perlombaan | <ul style="list-style-type: none"> • Prayitno |
| Kabid Dana dan Usaha | <ul style="list-style-type: none"> • Andi Azwan , BBUS, M.BA |

| | |
|----------------------------------|---|
| Wakabid Dana dan Usaha | <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Ben Umar |
| Kabid Perencanaan dan Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> • Fakhruisyah Mega |
| Wakabid Perencanaan dan Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> • Almuniza KamaL, S.STP, M.Si |
| Kabid Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Hidayat Mashud, SH., MM |
| Wakabid Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • M. Amin Said, SH, M.Hum |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Hendri Pandiangan • Tuti Sumarni, SH |
| Kabid Sarana dan Prasararana | <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Fakhri, ST |
| Wakabid Sarana dan Prasararana | <ul style="list-style-type: none"> • Tatang Feri Budiman |

Sumber : PB PERPANI Pusat, 2022 (<http://perpani.id/?page=pb-perpani2020-2022>)

B. Profil Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan

Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan merupakan cabang induk organisasi olahraga yang menjadi bagian dan naungan lembaga otoritas keolahragaan bernama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Induk organisasi olahraga di Indonesia berada di bawah naungan lembaga otoritas keolahragaan bernama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Salah satu cabang induk organisasi olahraga tersebut adalah PERPANI Sumsel, keberadaan PERPANI Sumsel berfungsi untuk mengembangkan dan membina olahraga dibawah naungannya.

PERPANI Sumsel beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 1048, Kota Palembang. Untuk sementara ini sekretariat PERPANI Sumsel masih menumpang di kantor KONI Sumsel.

1. Visi dan Misi PERPANI Sumsel

Visi dan Misi PERPANI Sumsel adalah menjadikan PERPANI Sumsel sebagai cabang induk olahraga panahan yang profesional, untuk membina, membangun prestasi atlet daerah Sumsel, guna mengangkat harkat dan martabat daerah Sumsel serta bangsa Indonesia.

2. Tugas Pokok PERPANI Sumsel

Berikut ini merupakan tugas pokok PERPANI Sumsel :

1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet, kinerja wasit, pelatih dan manajer, guna mewujudkan prestasi keolahragaan panahan daerah Sumsel

menuju prestasi nasional hingga internasional, serta turut memperkokoh persatuan dan kesatuan dan ketahanan nasional dalam rangka mengangkat harkat serta martabat Indonesia.

2. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga panahan.
3. Memasyarakatkan olahraga panahan yang dibina oleh anggota PERPANI Sumsel bersama KONI Sumsel guna mencapai prestasi optimal.
4. Membangun dan membina persahabatan antara daerah hingga level nasional dan internasional melalui kerjasama dan hubungan cabor panahan, baik pada lingkup bilateral maupun multilateral dalam konteks keanggotaan organisasi olahraga panahan.

3. Kepengurusan Organisasi PERPANI Sumsel

Menurut Deni Sukrorini (2009:13) Organisasi merupakan sesuatu yang sulit dilihat dan diraba tetapi didalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan eksistensinya. Disini yang dimaksud dengan organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

Adapun hakikat organisasi menurut Harsuki (2012: 117) adalah sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Organisasi sebagai wadah. Sebagai wadah, organisasi adalah tempat dimana kegiatankegiatan administrasi dan, manajemen sehingga bersifatrelatif statis. Setiap organisasi perlu memiliki suatu poladasar struktur organisasi yang relatif permanen. Dengan semakin kompleksnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan seperti berubahnya tujuan, pergantian pimpinan, beralihnya kegiatan, semuanya yang menuntut adanya perubahan dalam struktur suatu organisasi.
2. Organisasi sebagai proses. Organisasi sebagai proses menyoroti interaksi antara orang-orang di dalam organisasi itu. Oleh karena itu, organisasi sebagai proses jauh lebih dinamis sifatnya dibandingkan

dengan organisasi sebagai wadah. Hasil dari pengorganisasian ialah terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka upaya pencapaian tujuan yang telah ditentukan, menurut perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila demikian halnya, maka suksesnya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik.

Lebih lanjut menurut menurut Harsuki (2012: 117) yang dimaksud dengan organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat tujuan yang jelas.
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi.
4. Adanya kesatuan arah.
5. Adanya kesatuan perintah.
6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang.
7. Adanya pemberian tugas.
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.
9. Pola dasar organisasi harus relatif permanen.
10. Adanya jaminan jabatan (*security of tenure*).
11. Balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.
12. Penempatan orang harus sesuai dengan keahliannya.

Kegiatan olahraga termasuk juga pendidikan jasmani yang mengandung misi untuk mencapian tujuan pendidikan, memerlukan manajemen yang baik. Organisasi olahraga, lebih-lebih pendidikan jasmani dihadapkan dengan kekurangan yang kronis, lemahnya dukungan, kecilnya dana yang disediakan dan kesulitan lain untuk menumbuhkan programnya. Maka kemampuan menejerial sangat dibutuhkan yang intinya adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (Rusli Lutan, 2000: 8-9).

4. Struktur Organisasi PERPANI Sumsel

Dena Septiana (2013:8) menyebutkan bahwa terdapat faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi yaitu:

1. Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya.
2. Anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi.
3. Ukuran organisasi, besar kecilnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi.

Setelah disusunnya atau dibuatnya struktur organisasi yang di dalamnya sudah terdapat tugas dan wewenang tiap-tiap pejabat atau petugas di dalamnya untuk memperjelas struktur organisasi ini perlukan sesuatu bagan organisasi agar lebih singkat padat dan jelas dengan gambar yang mempunyai identik berbentuk kotak- kotak atau garis-garis yang disusun menurut kedudukannya masing-masing mempunyai fungsi tertentu yang satu sama lain berhubungan sesuai wewenang dan tanggung jawab di dalamnya.

Berikut adalah susunan pengurus organisasi PERPANI Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2018-2022.

Tabel 1 Susunan Pengurus Organisasi PERPANI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2018-2022

| | | |
|---|-------------|--|
| I. Pelindung/Penasehat | : | 1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN 2. REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA 3. DIREKTUR POLITEKNIK SRIWIJAYA 4. KETUA UMUM PB PERPANI JAKARTA 5. KETUA UMUM KONIPROV.SUMSEL |
| II. Pembina | : | 1. SEKRETARIS DERAH PROV.SUMSEL 2. KADISPORA PROV.SUMSEL 3. Ir. H. Ucok Hidayat 4. Nirmala Dewi, SH. 5. DR. Aufa Syarkomi, M.Si. 6. K.H.Yuristian AH, SH. |
| III. PENGURUS HARIAN Ketua Umum Ketua Harian Wakil Ketua I | : : : | DRS. M. DHANI INDRA, M.Si. Erwin Ibrahim, ST.MM.MBA M. Yusef Rizal, SPd |

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| Wakil Ketua II | : | DR. Andreas Lionardo, M.Si. |
| Wakil Ketua III | : | Bambang Suprianto |
| Wakil Ketua Umum IV | : | Drs. Ishak Idrus, SE.M.Si. |
| Sekretaris Umum | : | Drs. Faizal, A.Ma. |
| Wakil Sekretaris | : | Bahriansyah, S.Sos |
| Bendahara | : | Fadilah Utami, SE. |
| Wakil Bendahara | : | Teddy Indriyadi |

IV. Bidang-Bidang

| | | |
|--|---|--|
| 1. Bidang Pembinaan & Prestasi | | |
| Ketua | : | Drs. Danny K.Aerosta |
| Wakil Ketua | : | M. Irfan Nugroho, SPd. |
| Anggota | : | 1. Deslina Wasdry, SIP. MA. 2. M. Hidayat Ilham, SIP. 3. Tata Fariyansah |
| 2. Bidang Kepelatihan | | |
| Ketua | : | Reza R.Pratama,SPd.M.Pd. |
| Wakil Ketua | : | Widharma Novrianto, S.Psi.M.Si. |
| Anggota | : | 1. Aldiga B.Avianto 2. Rizki Maharani, SIP. 3. Anthoni Marten,SP. MM. |
| 3. Bidang Perwasitan dan Pertandingan | | |
| Ketua | : | Denny TD |
| Wakil Ketua | : | Deriansyah, SP. M.Si. |
| Anggota | : | 1. Lili Sukarno 2. AlKodri, SPd. 3. Sertu Sandy Arya Kusuma, SH. 4. Kuntoro |
| 4. Bidang Organisasi | | |
| Ketua | : | Al Fahmi |
| Wakil Ketua | : | Zulkarnain, SH. |
| Anggota | : | 1. Adriansyah, M.Si. 2. Mustofa Andika Yudha, SIP, M.Si. 3. Hendra Irawan, SE. |

| | | |
|---|----------------------|--|
| <p>5. Bidang Media & Humas</p> <p>Ketua Anggota</p> | <p>: : :</p> | <p>Rustam Imron, SH. 1. Leti Karmila, SI.Kom, M.I.Kom 2. Rafika Duri, SIP</p> |
| <p>6. Bidang Hukum</p> <p>Ketua Anggota</p> | <p>: : :</p> | <p>Jamaluddin, SH. 1. Freddy Okta Nugraha, SH. MM. 2. Her Lubis, SH. 3. Tito Dalkuci,SH.</p> |
| <p>7. Bidang Sarana dan Prasarana</p> <p>Ketua Anggota</p> | <p>: : :</p> | <p>Hatta. MS 1. Drs. M. Ansyori Ismail, M.Si. 2. Ronald Harmas, S.I.Kom</p> |
| <p>8. Bidang Dana dan Usaha</p> <p>Ketua Anggota</p> | <p>: : :</p> | <p>M. Taufik, SIP. Ricky Ricardo, SE. Derriansyah, PI. SP.M.Si.</p> |
| <p>9. Bidang Umum & Kesekretariatan</p> <p>Ketua Anggota</p> | <p>: : :</p> | <p>Em Zen, M.Pd. 1. Taufik Amani 2. Januar Eko Ariansyah, SIP.M.Si.</p> |
| <p>10. Bidang Kesehatan</p> <p>Ketua Anggota</p> | <p>: : :</p> | <p>Dr. Rizky Novianti, Sp.An 1. Dr. Ferra Rodayanti, Sp.M 2. Yustiana, A.M.Kep</p> |

Sumber : Sekretariat PERPANI Sumsel, 2022

BAB V

PROSES PEMBINAAN PRESTASI ATLET PANAHAN

A. Studi Kasus

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan. Data yang ada mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin yang mana teori ini memiliki tiga (3) dimensi yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan khususnya terkait pada pembinaan prestasi atlet.

Ketiga dimensi yang dimaksud oleh Ripley dan Franklin adalah (1) tingkat kepatuhan, (2) kelancaran rutinitas fungsi dan (3) terwujudnya kinerja dan dampak yang di inginkan. Ketiga dimensi tersebut akan membimbing penulis dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan ketiga dimensi tersebut penulis akan memaparkan apa saja hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan.

Pada bab ini, data yang sudah di kumpulkan akan di analisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Analisis akan dilakukan perdimensi untuk tiap-tiap indikator dan akan di mulai dari indikator pertama dari dimensi pertama adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Tingkat Kepatuhan

Dimensi pertama adalah tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan pembinaan prestasi atlet unggulan pada cabang panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan. Terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu (1) Sosialisasi olahraga panahan, (2) Penyaringan calon atlet berprestasi. Penjelasan dari indikator tersebut terdapat di bawah ini:

a. Sosialisasi Olahraga Panahan

Sosialisasi merupakan proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Mengenai sosialisasi olahraga panahan merupakan salah satu olahraga yang sudah sejak lama ada di dunia. Akan tetapi sejarah mengatakan belum ada yang mengetahui dengan pasti

kan manusia mulai memanah. Namun pada tahun 1676 atas prakarsa Raja Charles II dari Inggris panahan mulai dipandang sebagai suatu cabang olahraga (Prasetyo, 2011). Mengenai tingkat kepatuhan pada indikator sosialisasi olahraga panahan yang di lakukan oleh Pengprov PERPANI Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5.1 Tingkat Kepatuhan Sosialisasi Olahraga Panahan di Sumatera Selatan

| No | Deskripsi | Keterangan |
|----|---|--|
| 1 | Pemassalan olahraga panahan | <ul style="list-style-type: none"> • PERPANI Sumsel bekerja sama dengan Dispora Sumsel untuk menginstruksikan sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat atas agar mengarahkan para siswa-siswanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Memanah yang di adakan setiap masing-masing sekolah. • Mempopulerkan olahraga panahan sebagai salah satu olahraga sunnah yang dianjurkan Nabi serta dapat destinasi wisata baru di Sumsel • Memberikan edukasi kepada masyarakat akan manfaat dari olahraga panahan bagi kesehatan fisik dan mental. |
| 2 | Pemberian izin pendirian klub atau perkumpulan olahraga panahan | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan kepada masyarakat atau komunitas-komunitas pemuda pecinta sunnah (memanah) dalam prosedur izin pendirian klub atau perkumpulan olahraga panahan di Sumsel. • Klub panahan yang mendapatkan izin yang resmi dari PERPANI Sumsel telah mematuhi peraturan yang berlaku sehingga kegiatannya dapat di pertanggung jawabkan apabila terdapat kecelakaan dalam olahraga panahan ini yang merupakan olahraga menggunakan senjata tajam. |

Sumber: Penulis dari hasil wawancara mendalam, 2022

Dari Tabel 5.1 tersebut di atas terlihat bahwa tingkat kepatuhan dalam indikator proses sosialisasi dalam rangka mempopulerkan olahraga panahan adalah sudah berjalan baik.

Hal ini ditunjukkan dengan cara melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan untuk menganjurkan setiap sekolah-sekolah setingkat SD, SMP dan SMA untuk mewajibkan siswa-siswanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler panahan. Kemudian, menjadikan olahraga panahan sebagai olahraga Sunnah yang dianjurkan Nabi serta bisa menjadi tempat destinasi wisata yang menarik simpati masyarakat sambil memberikan edukasi tentang manfaat dari olahraga panahan.

Dalam rangka perluasan kegiatan olahraga panahan, Pengurus Provinsi PERPANI Sumsel memberikan kemudahan bagi masyarakat atau komunitas panahan di Sumsel untuk membuat klub atau perkumpulan olahraga panahan yang resmi. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan bisa terkontrol dan dapat di pertanggung jawabkan. Berikut adalah data yang diperoleh penulis tentang jumlah klub atau perkumpulan olahraga panahan yang tercatat resmi anggota di PERPANI Sumsel.

Tabel 5.2 Daftar Klub Panahan Anggota Resmi PERPANI Sumsel

| No | Nama Klub Panahan | Keterangan |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | PERPANA RU 3 Plaju | <ul style="list-style-type: none"> • SK : 04/ORG/KPTS/III/2019 • Koordinator : M. Solihin • Wakil : Herdi Arwanata |
| 2 | ADI SUCIPTO 13 ARCHERY CLUB “AS 13” | <ul style="list-style-type: none"> • SK : 05/ORG/KPTS/VI/2019 • Ketum : Sayuti Lubis • Ketua Harian : Zainudin, S.Pd |
| 3 | HEXA ARCHERY | <ul style="list-style-type: none"> • SK : 06/ORG/KPTS/VII/2019 • Ketua : Andhika R. Redha • Wakil : Firman Hidayat |
| 4 | METEOR LIONARDO ARCHERY (MLA) | <ul style="list-style-type: none"> • SK : 03/ORG/KPTS/IV/2017 • Ketua : Andries Lionardo • Wakil : Musthafa Andika |

Sumber: Penulis dari hasil observasi, 2022

Dari Tabel 5.2 di atas diketahui bahwa jumlah klub atau perkumpulan olahraga panahan anggota PERPANI Sumsel sejak tahun

2017 berjumlah empat (4) klub dan kemungkinan akan terus bertambah jika di lihat dari menjamurnya komunitas-komunitas panahan. Dengan tercatatnya klub-klub panahan ini secara administrasi, maka mereka mendapatkan hak dan tanggung jawab serta proses pelatihan dan pembinaannya telah diatur dan berorientasi dengan AD/RT PERPANI Provinsi Sumatera Selatan.

Pengenalan Olahraga Panahan sebagai olahraga prestasi terbilang baru di Indonesia. Popularitasnya belakangan ini mulai meningkat, terbukti sejak di buatnya film layar lebar yang berjudul “Tiga Srikandi” bisa mendongkrak popularitas olahraga panahan. Yakni bercerita tentang perjuangan tiga pemahan putri Indonesia untuk meraih medali di ajang Olimpiade.

Menurut (Rahadian, 2018) Olahraga juga merupakan salah satu media untuk membuat kondisi kesehatan manusia menjadi lebih baik dan terjaga. Olahraga panahan saat ini mempertandingkan empat divisi, yakni *Divisi Recurve*, *Divisi Compound*, *Divisi Barebow* dan *Divisi Standar Bow* dengan format bisa dilaksanakan *outdoor* maupun *indoor*.

Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan juga di kenal sebagai daerah yang memiliki pengaruh agama yang kuat, khususnya agama Islam. Olahraga panahan juga merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan dalam Agama Islam. Panahan menjadi Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain berenang dan berkuda.

Terdapat riwayat hadits tentang panahan merupakan olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “*Segala sesuatu yang tidak mengandung dzikirullah padanya maka itu adalah kesia-siaan dan main-main kecuali empat perkara: yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang.*” (HR. An-Nasai No. 8890). Oleh sebab itu tidak heran olahraga panahan di Provinsi Sumsel sangat berkembang dan populer dari berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan data yang telah dianalisis penulis menarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan pada indikator proses sosialisasi olahraga panahan telah di patuhi dengan baik oleh Pengprov PERPANI Sumatera Selatan. Hal tersebut berdasarkan PERPANI Sumsel telah mengedukasi dan mengenalkan olahraga panahan sejak anak-anak siswa setingkat SD sampai SMA. Kemudian PERPANI Sumsel juga memberikan kemudahan izin pendirian klub atau perkumpulan olahraga

panahan secara resmi. Hal ini di dukung pula oleh faktor masyarakat Sumatera Selatan yang ingin mengaplikasikan anjuran olahraga Sunnah Nabi sehingga dengan mudah para keluarga menganjurkan para anggota keluarga untuk melakukan olahraga panahan.

Selanjutnya akan di analisis indikator kedua dari dimensi pertama tingkat kepatuhan yaitu penyaringan calon atlet berprestasi.

b. Penyaringan Calon Atlet Berprestasi

Penyaringan adalah proses pencarian bakat pada calon atlet panahan yang memiliki prospek untuk berprestasi. Proses penyaringan calon atlet berprestasi ini sangat penting karena merupakan awal mula dari berjalannya kebijakan pembinaan prestasi atlet yang unggul di Sumatera Selatan, yang kemudian akan dibina agar terus berkembang dan dapat konsisten menuai prestasi. Mengenai tingkat kepatuhan pada indikator penyaringan calon atlet berprestasi yang dilakukan oleh Pengprov PERPANI Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 5.3 pada halaman :

Tabel 5.3 Tingkat Kepatuhan Penyaringan Atlet Berprestasi

| No | Deskripsi | Keterangan |
|----|---|--|
| 1 | Tahapan penyaringan calon atlet berprestasi | <ul style="list-style-type: none"> • Pencarian calon atlet berprestasi dapat ditemukan pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, klub-klub atau perkumpulan olahraga panahan di seluruh wilayah Sumatera Selatan • Atlet kemudian di seleksi khusus atau kejuaraan pada tingkat Kabupaten/Kota. • Hasil penyeleksian kemudian di angkat ke tingkat provinsi |
| 2 | Klasifikasi calon bibit atlet berprestasi | <ul style="list-style-type: none"> • Calon atlet berprestasi harus memiliki IQ rata-rata minimal 120 • Memiliki mental dan fisik yang kuat sehingga dapat menyelesaikan masalah di dalam mengikuti kejuaraan. |

- Masuk program “Sumsel Emas” dengan syarat memiliki prestasi di Kejuaraan atau POPNAS tingkat junior.
-

Sumber: Penulis dari hasil wawancara mendalam, 2022

Dari Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa implementor tingkat kepatuhan penyaringan atlet berprestasi yang dilaksanakan Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan PERPANI Sumsel adalah sudah baik.

Hal ini berawal dan dapat ditemukan pada setiap kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, klub atau komunitas olahraga panahan yang memiliki prospek untuk menjadi bibit atlet yang berprestasi. Kemudian calon bibit atlet berprestasi harus memenuhi standarisasi atau klasifikasi atlet berprestasi yang kemudian layak mengikuti program pembinaan provinsi Sumatera Selatan yang bernama “Sumsel Emas”.

Adanya penyaringan calon atlet berprestasi yang dilakukan oleh PERPANI Sumsel telah merujuk kepada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga pada pasal 16 bahwa setiap daerah harus melakukan pembinaan terhadap atlet dari sejak usia *junior*. Tujuan penyaringan calon atlet berprestasi ini adalah untuk mencari dan menyeleksi siapa calon atlet yang memenuhi standarisasi dan klasifikasi atlet berprestasi sehingga mampu masuk ke dalam program pembinaan prestasi atlet daerah.

Pengprov PERPANI Sumsel yang menjadi induk olahraga panahan di Sumatera Selatan akan melakukan seleksi terhadap kontingen perwakilan masing-masing klub atau perkumpulan olahraga panahan dengan menentukan standar kebijakan pembinaan prestasi. Oleh sebab itu, atlet yang lolos seleksi akan terus giat berlatih dan mengikuti kompetisi yang akan menambah pengalaman atau jam terbang bertanding mereka. Berikut adalah hasil dokumentasi penulis yang menunjukkan para atlet panahan berbakat yang telah mencapai prestasi dalam proses penyaringan/seleksi yang di selenggarakan PERPANI Sumsel.

Gambar 5.1 Calon Atlet Panahan Yang Mengikuti Proses Penyaringan Atlet Berprestasi



Sumber: Penulis dari hasil dokumentasi, 2022

Proses penyaringan untuk mencari calon atlet yang berprestasi merupakan tahapan yang sangat penting dilakukan dalam dunia olahraga. Menurut Rumini (2011: 1) bahwa tujuan utama penyaringan atau mengidentifikasi bakat calon atlet adalah untuk menyeleksi calon atlet yang memiliki berbagai kemampuan tertinggi dalam suatu cabang olahraga tersebut. Oleh karena itu, proses penyaringan bakat calon atlet berprestasi harus menjadi perhatian yang serius pada olahraga prestasi. Hal ini senada dengan yang di utarakan oleh Pengprov PERPANI Sumsel melalui Kepala Bidang Pembinaan Prestasi yang mengatakan bahwa semua proses penyaringan calon atlet berprestasi akan mendapatkan perhatian lebih serta dilaksanakan dengan pedoman peraturan yang berlaku.

Berdasarkan data yang telah di analisis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan PERPANI Sumsel dalam proses penyaringan atlet berprestasi telah dipatuhi dengan baik. Ditunjukkan dengan keataatan terhadap tahapan-tahapan penyaringan calon atlet berprestasi dan penetapan klasifikasi atlet yang memiliki potensi bakat untuk menjadi atlet yang unggul bagi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan indikator-indikator pada dimensi pertama yaitu Tingkat Kepatuhan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dimensi Tingkat Kepatuhan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Alet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan sudah dipatuhi oleh unsur-unsur penyelenggara pembinaan prestasi atlet sesuai peraturan dan SOP yang telah ditetapkan.

Selanjutnya akan di analisis dimensi yang kedua tentang kelancaran rutinitas fungsi yang terdiri dari 3 (tiga) indikator adalah sebagai berikut.

2. Dimensi Kelancaran Rutinitas Fungsi

Rutinitas fungsi dalam implementasi kebijakan pembinaan prestasi atlet unggulan pada cabang panahan di PERPANI Sumsel ialah adanya ketersediaan anggaran, ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana. Jika fungsi ini tidak terjadi secara terus-menerus maka implementasi kebijakan dapat terhambat dan tidak berjalan dengan baik. Berikut akan di analisis dimensi kedua kelancaran rutinitas fungsi dengan indikator yang pertama.

a. Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan elemen yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan sebuah kebijakan. Dalam banyak hal keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari lancar atau tidaknya ketersediaan sumber daya modal. Jika ketersediaan sumber daya modal ini tidak tersedia dengan baik maka tentu akan mengganggu kelancaran rutinitas fungsi dari pembinaan prestasi atlet panahan di Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan pentingnya ketersediaan anggaran yang diperlukan oleh PERPANI Sumsel dalam program pembinaan prestasi atlet unggulan. Berikut adalah hasil wawancara dengan pengurus PERPANI Sumsel melalui Sekretaris Umum PERPANI Sumsel mengenai ketersediaan anggaran dalam implementasi kebijakan pembinaan prestasi atlet unggulan di Sumatera Selatan. Dapat dilihat Tabel 5.4 berikut :

Tabel 5.4 Ketersediaan Anggaran Dalam Pelaksanaan Pembinaan Prestasi Atle Panahan Sumsel

| No | Deksripsi | Keterangan |
|----|---------------------|--|
| 1 | Sumber Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> • Bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD : Dana APBN melalui KONI Pusat – Daerah – KONI Provinsi – Pengrov PERPANI. Sedangkan dana bantuan dari APBD melalui Pemerintah Daerah – KONI Provinsi – Induk Cabang Olahraga (Pengrov PERPANI) • Kemudian Dana dari Pihak ketiga di antaranya BUMN atau BUMD |
| 2 | Penggunaan Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> • Akomodasi dan transportasi atlet dan tim selama proses pembinaan prestasi atlet dan pelatihannya yang biasa berlangsung dalam persiapan menghadapi kejuaraan Pekan Olahraga Nasional. • Gaji pelatih dan wasit • Biaya pemeliharaan alat panahan |
| 3 | Kecukupan Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan anggaran yang diterima oleh PERPANI Sumsel dirasakan kurang maksimal. Karena untuk pengadaan pembinaan prestasi atlet kurang memenuhi persyaratan untuk masuk program pembinaan prestasi. Serta diketahui bahwa cabor panahan di Sumatera Selatan di nilai belum mampu berbicara banyak sehingga KONI Sumsel belum memberikan perhatian lebih demi efektivitas anggaran. • Dalam keadaan pandemi COVID 19, sejak tahun 2020 anggaran belum dicairkan dan berdampak dengan kegiatan tidak bisa dilaksanakan. |

Namun secara umum, pada saat PON Papua cabor panahan Sumsel mengirim 1 atlet mewakili Sumsel dan anggaran yang dibutuhkan dapat mencukupi atlet tersebut selama pertandingan.

Sumber: Penulis dari hasil wawancara mendalam, 2022

Data pada Tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa Ketersediaan Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan pembinaan prestasi bagi atlet cabor Panahan di PERPANI Sumsel secara keseluruhan tidak berjalan dengan lancar sesuai fungsinya.

Anggaran untuk pembinaan prestasi atlet bersumber dari APBN, APBD serta pihak ke tiga yaitu BUMN atau BUMD. Kemudian dalam penggunaannya, PERPANI Sumsel banyak menyalurkan dana tersebut untuk akomodasi dan transportasi selama proses pembinaan dan pelatihan, untuk gaji pelatih dan wasit kemudian untuk biaya pemeliharaan alat panahan. Selanjutnya untuk kecukupan anggaran, ditemukan terdapat kekurangan yang secara umum sangat mendasar, dimana alokasi dana untuk PERPANI Sumsel terhambat karena kurangnya pemenuhan persyaratan program pembinaan prestasi atlet, sehingga pencairan dana tidak maksimal serta di hambat dengan kondisi pandemi COVID 19, sejak tahun 2020 PERPANI Sumsel tidak bisa melaksanakan program pembinaan prestasi atlet dengan lancar.

Aspek ketersediaan anggaran merupakan modal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan prestasi atlet unggulan pada cabor panahan di PERPANI Sumsel. Hal ini sejalan dengan pendapat Tendi Haruman (2006: 6) mengemukakan bahwa ketersediaan anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan data dan teori yang dianalisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam dimensi rutinitas fungsi dari indikator ketersediaan anggaran dalam implementasi pembinaan prestasi atlet unggulan pada cabor panahan di PERPANI Sumsel adalah tidak berjalan maksimal. Dimana pada aspek kecukupan anggaran

sebagaimana analisis di atas tidak dapat mencukupi kegiatan program pembinaan prestasi atlet secara maksimal.

Selanjutnya akan di analisis dimensi yang kedua kelancaran rutinitas fungsi mengenai ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai berikut.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Selain ketersediaan anggaran, hal yang dibutuhkan dalam kelancaran rutinitas fungsi pembinaan prestasi atlet unggulan oleh PERPANI Sumsel adalah Sumber daya manusia (SDM). Keseluruhan ketersediaan SDM berkaitan dengan rutinitas fungsi ini telah ada pada program yang ditentukan oleh PERPANI Sumsel dalam rangka pelaksanaan program pembinaan prestasi atlet unggulan Sumsel, dapat dilihat pada Tabel 5.5 dibawah ini.

Tabel 5.5 Data Sumber Daya Manusia Dalam Pembinaan Prestasi Atlet

| No | Deskripsi | Keterangan |
|----|--------------------------------------|---|
| 1 | Jumlah Pengurus Pembinaan | <ul style="list-style-type: none"> • Pengurus pembinaan semua disediakan oleh PERPANI berjumlah : 35 orang |
| 2 | Jumlah Pelatih dan Wasit Berkompeten | <ul style="list-style-type: none"> • Pelatih : <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi nasional : 5orang - Sertifikasi daerah : 10 orang • Wasit : <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi ITO : 3 orang - Sertifikasi nasional : 1 orang - Sertifikasi daerah : 9 orang |

Sumber: Penulis dari hasil wawancara mendalam, 2022

Data pada Tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam kelancaran rutinitas fungsi untuk Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan dinilai kurang berjalan lancar.

Jumlah pengurus pembinaan dan jumlah pelatih dan wasit yang berkompeten memiliki SDM dalam pembinaan prestasi atlet cabor panahan Sumsel masih dirasakan kurang secara kuantitas dan berkompeten secara kualitas di bidangnya untuk melaksanakan program

pembinaan prestasi atlet unggulan pada cabang panahan di PERPANI Sumsel. Jika SDM dalam rutinitas pembinaan prestasi atlet panahan di PERPANI Sumsel tidak tersedia dengan belum cukup dan kompeten, maka dapat menghambat dalam peningkatan kualitas atlet panahan itu sendiri. Berkaitan sumber daya manusia tentang kelancaran rutinitas fungsi dalam implementasi pembinaan prestasi atlet unggulan cabang panahan di PERPANI Sumsel dapat di lihat pada data Tabel 5.6 di bawah ini.

Tabel 5.6 Fungsi Sumber Daya Manusia di PERPANI Sumsel

| No | Sumber Daya Manusia | Fungsi |
|----|---------------------|--|
| 1 | Sumber daya pembina | <ul style="list-style-type: none"> • Membina atlet untuk membantu peningkatan prestasi • Sebagai koordinator antar PERPANI Sumsel, KONI Provinsi Sumsel dengan pemerintah Daerah dalam upaya pembinaan dan pelatihan bagi atlet panahan Sumsel |
| 2 | Sumber daya pelatih | <ul style="list-style-type: none"> • Membuat metode pelatihan sebagai pedoman mengukur perkembangan dan peningkatan kualitas teknik dan mental atlet panahan |
| 3 | Sumber daya wasit | <ul style="list-style-type: none"> • Berwenang untuk menegakkan peraturan atau hukum dalam pertandingan atau kejuaraan panahan. |

Sumber: Penulis dari pengamatan dan wawancara, 2022

Tabel 5.6 di atas diketahui dengan jelas bahwa keterkaitan ketersediaan sumber daya manusia dengan lancarnya implementasi pembinaan prestasi atlet cabang panahan di PERPANI Sumsel sangat penting. Semua unsur sumber daya manusia telah melakukan fungsinya sesuai kualifikasi kerja di PERPANI Sumsel.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada pada PERPANI Sumsel sangat mendukung dalam implementasi kebijakan pembinaan prestasi atlet unggulan di Sumsel dengan baik. Sumber daya manusia yang tersedia diharuskan memiliki kualifikasi dan kemampuan yang cakap serta mampu menyelesaikan setiap tanggung jawabnya dengan

baik dan benar. Menurut Hasibuan (2003:244), sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu.

Sementara itu menurut Veithzal Rivai (2003:6), sumber daya manusia adalah seorang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Serta merupakan salah satu unsur masukan (*input*) yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin dan metode atau teknologi yang diubah menjadi keluaran (*output*) berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan Abdurahman Fathoni (2006:8) menyatakan sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia, karena manusia merupakan unsur mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan secara optimal.

Berdasarkan data dan teori yang penulis analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada indikator ketersediaan Sumber Daya Manusia belum berjalan dengan baik dalam kaitannya dengan kelancaran rutinitas fungsi dalam upaya pembinaan prestasi atlet unggulan di PERPANI Sumsel.

Selanjutnya, akan dibahas indikator ketiga (3) masih dalam dimensi kedua yaitu Sarana dan Prasarana.

c. Sarana dan Prasarana

Secara definisi sarana olahraga adalah sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam pelaksanaan atau dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani. Sedangkan secara umum prasarana berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang yang mempermudah atau memperlancar proses pembelajaran dan memiliki sifat yang relatif permanen. Salah satu sifat tersebut adalah susah dipindahkan.

Adanya sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan kelancaran rutinitas fungsi implementasi kebijakan pembinaan prestasi atlet pada cabang panahan di PERPANI Sumsel adalah sangat penting untuk dimiliki. Mengenai sarana dan prasarana panahan yang dimiliki oleh PERPANI Sumsel, dapat di lihat pada Tabel 5.7 berikut ini.

Tabel 5.7 Sarana dan Prasarana Panahan PERPANI Sumsel

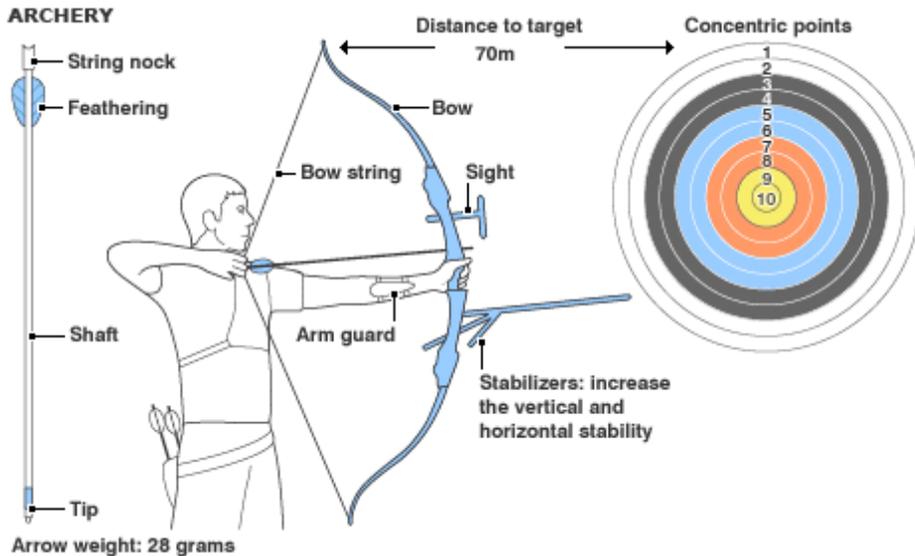
| No | Deskripsi | Keterangan |
|----|---|---|
| 1 | Ketersediaan peralatan dan perlengkapan panahan | <ul style="list-style-type: none"> • Peralatan: <ul style="list-style-type: none"> - Panahan jenis <i>Recurve Bow</i> : 6 Unit (kondisi baik) <ul style="list-style-type: none"> ✓ 3 untuk latihan ✓ 3 untuk pertandingan • Perlengkapan: <ul style="list-style-type: none"> - Jagrak dan Bantalan : 16 Unit Inventaris dari <i>Asian Games 2018</i> (kondisi kurang baik) - Target <i>Face</i> : 16 unit (kondisi kurang baik) |
| 2 | Kualitas lapangan untuk latihan | <ul style="list-style-type: none"> • Lapangan panahan di JSC (<i>Jakabaring Sport City</i>) memiliki kualitas dan standar yang baik. • Lapangan panahan di kompleks IBA, kualitas lapangannya baik. |

Sumber: Peneliti dari hasil wawancara mendalam, 2022

Dari data Tabel 5.7 di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasana panahan yang dimiliki oleh PERPANI Sumsel untuk program pembinaan prestasi atlet cabor panahan sudah cukup memadai, dilihat dari ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang ada belum lengkap.

Sarana dan prasarana Panahan PERPANI Sumsel sangat penting dipersiapkan dalam rangka pembinaan prestasi atlet cabor panahan memang sangat vital sebagai penunjang lancarnya rutinitas fungsi. Khusus peralatan panahan, PERPANI Sumsel menyediakan untuk atlet-atletnya panahan jenis *Recurve bow* sebanyak 6 unit, dalam penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu 3 unit untuk latihan dan 3 unit untuk ketika pertandingan. Namun, atlet terkadang memiliki alat panahan pribadi yang mereka gunakan untuk latihan dan pada saat hari pertandingan. Berikut adalah gambar peralatan dan perlengkapan panahan dapat dilihat pada Gambar 5.2 di bawah ini:

Gambar 5.2 Peralatan dan Perlengkapan Panahan



Sumber: Studi dokumentasi, 2022

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 999) menjelaskan, Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan . Contoh dalam olahraga panahan yaitu busur, bantalan, target face dan lain-lain. Suryobroto (2004: 4) menjelaskan Sarana adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran olahraga, mudah dipindahkan dan dibawa oleh pelakunya. Sarana atau alat sangat penting dalam memberikan motivasi olahragawan untuk bergerak aktif, sehingga sanggup melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh dan akhirnya tujuan aktivitas dapat tercapai.

Sedangkan definisi prasarana olahraga panahan menurut Soepartono (2000: 5) menjelaskan secara umum prasarana berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha atau pembangunan), Dalam olahraga prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang memudahkan atau memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen. Salah satu sifat tersebut adalah sulit dipindahkan. Berikut adalah gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan dibawah ini:

Gambar 5.3 Sarana dan Prasarana Olahraga Panahan Sumsel



Sumber : Studi dokumentasi, 2022

Berdasarkan data dan teori yang penulis analisis diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada indikator ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PERPANI Sumsel dapat dinilai belum lengkap untuk menunjang keberhasilan pembinaan prestasi atlet PERPANI Sumsel.

Dari hasil analisis dan pembahasan indikator-indikator pada dimensi kedua yaitu Kelancaran Rutinitas Fungsi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dimensi Kelancaran Rutinitas Fungsi dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Alet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan bisa dinilai bahwa kelancaran dan fungsi dari pembinaan prestasi atlet PERPANI Sumsel belum berjalan dengan baik.

Selanjutnya, akan dibahas dimensi selanjutnya adalah dimensi Kinerja dan Dampak Yang Diinginkan.

3. Dimensi Kinerja dan Dampak yang Diinginkan

Implementor sebuah kebijakan yang memiliki kinerja tinggi adalah implementor yang taat pada ketentuan dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga dapat menghasilkan dampak yang baik, namun sebaliknya apabila implementor memiliki kinerja rendah maka akan menghasilkan dampak yang kurang baik.

Untuk dimensi ketiga ini diukur secara terpisah. Dimensi ini terdiri dari dua aspek yaitu Dimensi Kinerja dan Dampak yang Diinginkan yang masing-masing memiliki indikator tersendiri. Berikut adalah analisisnya.

a. Dimensi Kinerja

Kinerja (*performance*) merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan. Dimensi Kinerja dalam implementasi kebijakan tentang pembinaan prestasi atlet pada cabang olahraga panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan adalah berkonsentrasi pada indikator pembinaan dan pengembangan prestasi atlet. Terdapat 2 (dua) deskripsi indikator yaitu (1) proses penyelenggaraan kompetisi, dan (2) perkembangan kondisi fisik, teknik dan mental atlet.

b. Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Atlet

Pembinaan prestasi merupakan pembinaan yang dilakukan dengan tujuan meraih sebuah prestasi olahraga yang setinggi-tingginya. Usaha-usaha ini memerlukan proses yang panjang dan sistematis. Pembinaan yang dilakukan tersebut akan sesuai dengan harapan apabila dilaksanakan secara efisien, sistematis dan berkelanjutan, karena suatu proses pembinaan olahraga membutuhkan waktu yang lama.

Mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh PERPANI Sumatera Selatan diketahui bahwa capaian kinerja tersebut penulis peroleh dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dapat dilihat pada Tabel 5.8 dibawah ini.

Tabel 5.8 Kinerja PERPANI Sumsel

| No | Deskripsi | Keterangan |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | Proses penyelenggaraan kompetisi | Kinerja yang telah dilakukan : <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum dari PB PERPANI belum ada, jadi masih dari masing-masing daerah • Pencarian bibit atlet dari tingkat |

| | |
|--|---|
| | <p>desa/kelurahan hingga pada tingkat kota dan wilayah Sumatera Selatan secara berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan calon atlet panahan yang bakal dibina dan di usulkan ke KONI Provinsi Sumsel • Terus dibimbing oleh para pelatih dan Pembina • Contoh atlet panahan Sumsel adalah Kurniawan (PON Papua) |
| <p>2 Perkembangan kondisi fisik, teknik dan mental atlet.</p> | <p>Perkembangan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fisik : melakukan latihan yang rutin untuk meningkatkan kekuatan fisik para atlet panahan sebanyak 3 kali seminggu atau bisa setiap hari jika mendekati kompetisi. • Teknik : melakukan peningkatan <i>Scoring</i> perbulan, perkenaan nilai, hasil pertandingan serta melakukan koreksi oleh pelatih agar tingkatannya lebih baik • Mental atlet : atlet binaan diberikan jam terbang yang banyak, diberikan motivasi untuk melakukan yang terbaik dan peningkatan kepercayaan diri atlet. |

Sumber: Peneliti dari hasil wawancara mendalam, 2022

Dari Tabel 5.8 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja yang dilakukan masih dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan adalah belum tercapai.

Hal tersebut berdasarkan temuan penulis bahwa kurikulum program pembinaan dan pelatihan kepada para atlet panahan yang belum dibuat oleh PERPANI daerah Sumsel, sehingga dalam implementasi kebijakan tentang pembinaan prestasi pada cabang

olahraga panahan di PERPANI Sumsel masih menyesuaikan turunan kurikulum pada PB PERPANI pusat. Namun dalam perkembangan kondisi fisik, teknik dan mental sudah dilaksanakan sesuai standar yang ada pada pembinaan prestasi atlet panahan di PERPANI Sumsel.

Proses penyelenggaraan kompetisi ini sangat penting dilakukan oleh PERPANI Sumsel, dimana pembibitan atlet bisa terlihat pada setiap pemenang kompetisi panahan tersebut. Setiap club atau perkumpulan olahraga panahan pasti memiliki atlet yang telah di siapkan untuk menjadi atlet panahan daerah yang terus tumbuh dan berkembang prestasinya hingga tingkat nasional bahkan internasional.

Pembinaan prestasi atlet panahan harus terus dilaksanakan secara sistematis dan berkala. Semakin baik sistem yang telah dijalankan, maka kinerja pada pembinaan prestasi atlet akan semakin baik pula. Pengurus provinsi PERPANI daerah Sumsel telah melahirkan atlet yang dinilai mampu berpotensi di tingkat nasional. Salah satu contoh nama yang telah lahir adalah Kurniawan yang sudah mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua pada tahun 2021, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam perkembangan kondisi atlet akan menjadi prioritas untuk menunjang para atlet dalam meraih prestasi. Atlet binaan PERPANI Sumsel mendapatkan porsi latihan yang cukup banyak dan dilakukan secara rutin. Peninngkatan fisik, teknik dan mental atlet diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan prestasi para atlet itu sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan pula dukungan yang layak pula bagi pelaku olahraga panahan untuk menunjang pembinaan prestasi atlet panahan yang telah di program dengan sistematis oleh pengurus PERPANI Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kompetisi merupakan persaingan atau pertandingan untuk merebut kejuaraan dalam gabungan perkumpulan olahraga, dan juga dapat diartikan sebagai sistem pertandingan olahraga yang mengharuskan semua pihak saling bertanding dan berhadapan untuk menentukan mana yang terbaik di antara atlet.

Jika kompetisi dilihat dari segi Ilmu Pengetahuan Alam, dapat diartikan sebagai simbiosis yang membuat interaksi antara individu yang saling memperebutkan suatu sumber daya yang jumlahnya terbatas. Dalam simbiosis kompetisi biasanya organisme yang lebih

kuatlah yang akan memenangkan sumber daya alam. Sedangkan organisme yang lebih lemah terpaksa harus mencari sumber daya lain dengan cara bermigrasi.

Dari data dan teori yang telah di analisis diatas, indikator proses pembinaan dan pengembangan kondisi prestasi atlet panahan di PERPANI Sumsel akan berjalan dengan lebih baik jika antara pembinaan dan pengembangan kondisi atlet sudah memiliki kurikulum atau program yang dirancang oleh pengurus PERPANI Sumsel sendiri. Namun secara keseluruhan sudah berjalan baik dalam pelaksanaan kompetisi yang rutin dan peningkatan kondisi fisik, teknik dan mental atlet telah mencapai kinerja yang sudah baik.

Berdasarkan analisis indikator diatas pada dimensi terwujudnya kinerja pada implementasi kebijakan tentang pembinaan prestasi atlet pada cabang olahraga panahan di PERPANI Sumsel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terwujudnya kinerja pembinaan prestasi atlet belum tercapainya kinerja yang baik.

Selanjutnya akan dianalisis dimensi terakhir yaitu Dampak yang diinginkan dalam implementasi kebijakan tentang pembinaan prestasi atlet pada cabang olahraga panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan.

c. Dampak

Hasil atau dampak kebijakan (*policy impact*) pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi atlet yang menjadi kelompok sasaran suatu kebijakan atau program yang dirasakan langsung oleh para atlet panahan di PERPANI Sumsel.

Dampak menurut Gory Kerap dalam Otto Soemarwoto (1998:35), adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik bersifat positif maupun negatif.

Sementara itu menurut JE. Hosio (2007:57), Dampak adalah perubahan yang nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaram kebijakan. Sedangkan menurut Irfan Islamy (2001:115), dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Terkait hal tersebut maka dampak yang diharapkan dapat dihasilkan dari Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan adalah terwujudnya peningkatan prestasi atlet panahan dan penghargaan (*reward*) yang didapatkan oleh atlet panahan Sumsel yang berprestasi.

d. Peningkatan Prestasi Atlet

Cabang olahraga panahan merupakan termasuk dalam jenis olahraga prestasi dalam dunia keolahragaan. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahrgaan.

Pada cabang olahraga panahan, telah banyak atlet binaan pengurus PERPANI Sumsel yang lahir dan menjadi atlet andalan bagi daerahnya masing-masing. Dalam indikator peningkatan prestasi atlet terdapat 2 (dua) deskripsi yaitu bentuk prestasi yang didapatkan atlet dan level kejuaraan. Berikut adalah hasil mengenai indikator peningkatan prestasi atlet cabang panahan binaan PERPANI Sumsel, lihat pada Tabel 5.9 dibawah ini.

Tabel 5.9 Peningkatan Prestasi Atlet Panahan Binaan PERPANI Sumsel

| No | Deskripsi | Keterangan |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Prestasi atlet yang didapatkan | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya 1 Atlet panahan perwakilan Sumsel pada PON Papua atas nama Kurniawan • Medali emas pada kejuaraan <i>Archery</i> tingkat Provinsi tahun 2021 atas Meizar Noor Rizal serta medali perunggu atas nama M. Risky Fidaus • Pada Kerjurnas Jambi Open 2021 atas nama M. Erdan Nugroho meraih medali emas dan atas nama Syarifah Aliyah meraih medali perunggu pada |

| | |
|-------------------|---|
| | devisi Nasional jarak 40 meter. |
| 2 Level kejuaraan | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan level kejuaraan - Kejuaraan OPEN antara Kota/Kabupaten - Kejuaraan daerah Sumsel POPDA, PORPROV - Kejunas pra PON - PON |

Sumber: Peneliti dari hasil wawancara mendalam, 2022

Tebel 5.9 di atas menunjukkan bahwa dalam indikator peningkatan prestasi atlet panahan pada Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan adalah belum mengalami peningkatan prestasi yang lebih tinggi.

Adanya bentuk perhatian dan dukungan dari berbagai pelaku olahraga panahan di daerah Sumatera Selatan sangatlah penting dirasakan oleh para atlet untuk peningkatan psikologi atlet. Bahkan bentuk apresiasi semacam ini sangat dibutuhkan oleh para atlet binaan. Dalam dunia keolahragaan, untuk meningkatkan prestasi para atletnya sudah menjadi hal yang lumrah pada kejuaraan atau setiap kompetisi para atlet diberikan berbagai bentuk prestasi yang telah dicapai, hal ini telah di sadari oleh Pengurus PERPANI Sumsel untuk memberikan kesempatan bagi para atlet binaannya agar terus semangat dalam mencapai peningkatan prestasi yang signifikan.

Dalam sebuah kompetisi, para atlet memiliki jenjang ataupun level kejuaraan yang akan digapai. Prestasi merupakan hasil yang dicapai oleh para atlet yang berprestasi dan mendapatkan juara. Oleh sebab itu perlunya jenjang karir yang lebih tinggi untuk memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi lagi bagi atlet panahan tersebut. Berikut adalah gambar para atlet binaan yang berprestasi pada kompetisi yang diadakan oleh PERPANI Sumsel, lihat pada gambar 5.4.

Gambar 5.4 Atlet Panahan Berprestasi Binaan PERPANI Sumsel



Sumber : Studi Dokumentasi, 2022

Menurut Sudarwati (2007:56), prestasi atlet merupakan kumpulan dari hasil-hasil yang telah dicapai oleh atlet dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya. Prestasi olahraga menurut UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Kelolahragaan Nasional BAB I Pasal I Nomor 17 bahwa prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahraga (tim) dalam kegiatan olahraga. Prestasi olahraga adalah tindakan yang sangat kompleks yang tergantung kepada banyak faktor, kondisi dan pengaruh-pengaruh lain.

Prestasi yang diperoleh oleh atlet akan terus meningkat manakala telah mengikuti berbagai macam proses pelatihan dan pembinaan secara rutin. Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi atlet. Proses dari latihan itu sendiri merupakan bentuk akumulasi dari berbagai faktor yang saling mendukung. Prestasi dari atlet itu sendiri ditentukan oleh beberapa faktor yang terdiri dari fisik, psikologi, lingkungan dan penunjang (Sajoto, 1995:18).

Berdasarkan data dan analisis pada indikator pertama yaitu Peningkatan Prestasi Atlet diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Dampak dari Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesi (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan adalah belum mengalami peningkatan yang menjanjikan. Diharapkan untuk prestasi atlet panahan Sumsel agar lebih di tingkatkan kembali hingga kelas Nasional bahkan Internasional.

Berikutnya adalah pembahasan dari indikator kedua dari Dimensi Dampak Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesi (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan yaitu Penghargaan (*Reward*).

e. Penghargaan (*Reward*)

Penghargaan (*reward*) dalam sebuah olahraga khususnya olahraga panahan merupakan buah dari hasil kerja keras atlet dan sebuah apresiasi yang diberikan untuk atlet atas perjuangannya dalam meraih prestasi juara. Sehingga perlu nya penghargaan ini dilakukan oleh PERPANI Sumsel agar tetap menjaga semangat dan meningkatkan mental kepada atlet panahan Sumsel agar terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Untuk melihat dampak indikator Penghargaan (*reward*) dalam Implemmentasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesi (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 5.10 berikut.

Tabel 5.10 Penghargaan (*Reward*)

| No | Deskripsi | Keterangan |
|----|---------------------------|--|
| 1 | Bentuk penghargaan | <ul style="list-style-type: none"> • Uang dan bonus lambat cair (berdasarkan tingkatan juara) <ul style="list-style-type: none"> - Medali emas = 10-25 Juta - Medali perak = 7,5 15 Juta - Medali perunggu = 5-10 Juta • Bonus tambahan dari pemerintah atau sponsor |
| 2 | Kesejahteraan hidup atlet | <ul style="list-style-type: none"> • Bisa direkomendasikan pekerjaan tetap : - Honor di pemerintahan |

- kota/provinsi
 - Sebagai PNS
 - Anggota TNI-Polri
 - Dapat menjadi pelatih dan pengurus organisasi induk cabang olahraga panahan kabupaten/kota.
-

Sumber: Peneliti dari hasil wawancara mendalam, 2022

Pada data Tabel 5.10 dapat diketahui bahwa dalam indikator Penghargaan (*reward*) pada dampak Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan adalah belum maksimal.

Penghargaan yang diberikan kepada atlet bervariasi sesuai dengan level prestasi yang mereka dapatkan. Namun terkadang penghargaan berupa bonus uang sering mengalami keterlambatan pencairan. Dan dapat diketahui pula bahwa pemerintah melalui PERPANI bersama KONI Provinsi Sumatera Selatan dalam penggunaan anggaran pada Cabang Panahan tidak terlalu banyak. Sehingga berdampak terhadap pembagian atau alokasi dana bagi para atlet.

Suatu penghargaan mayoritas sangat diinginkan oleh para atlet, inilah dampak dari kebijakan yang telah di implementasikan dalam pembinaan prestasi atlet khususnya olahraga panahan di PERPANI Sumsel. Penghargaan didefinisikan sebagai ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para karyawan agar produktivitasnya tinggi (Tohardi, 2002:317). Penghargaan merupakan insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif (Simamora, 2004:514).

Penghargaan dapat pula didefinisikan sebagai *reward* dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan (Mahmudi, 2005:89). Pengertian Penghargaan adalah kegiatan dimana organisasi menilai kontribusi karyawan dalam rangka untuk mendistribusikan penghargaan moneter dan non moneter cukup langsung dan tidak langsung dalam kemampuan organisasi untuk membayar berdasarkan peraturan hukum (Schuler, 1987). Berikut adalah gambar dari pemberian penghargaan

yang telah dipersembahkan untuk para atlet berprestasi dari PERPANI Sumsel. Lihat gambar 5.5 dibawah ini.

Gambar 5.5 Pemberian Penghargaan (*Reward*) Atlet Berprestasi



Sumber : Studi Dokumentasi, 2022

Jadi dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penghargaan (*reward*) merupakan apresiasi atau bentuk ganjaran yang diberikan kepada mereka yang mencapai target, tujuan dan memberikan kontribusi kepada organisasi yang berdampak terhadap produktivitas dan citra yang baik bagi organisasi tersebut.

Penghargaan (*reward*) sangatlah penting bagi atlet guna memotivasi serta menjaga produktivitas mereka dalam mempertahankan serta meraih prestasi yang lebih tinggi lagi sehingga berdampak pula bagi kebaikan dan citra baik bagi PERPANI Provinsi Sumsel.

Berdasarkan data dan teori diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak pemberian penghargaan (*reward*) dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan adalah belum dirasakan maksimal oleh para atlet panahan PERPANI Sumsel.

Dari hasil analisis dan pembahasan indikator-indikator pada dimensi ketiga yaitu Dampak Yang Diinginkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dimensi Dampak Yang Diinginkan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Alet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan bisa dinilai bahwa dampak kebijakan (*policy impact*) dari pembinaan prestasi atlet PERPANI Sumsel belum sesuai dengan yang diinginkan dari Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan.

KEBIJAKAN PUBLIK SEKTOR OLAHRAGA “Model Pembinaan Prestasi Panahan”

BAB VI

MASA DEPAN KEBIJAKAN PERPANI

Hasil pembahasan pada penelitian terhadap kajian Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Alet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Alet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan bisa dikatakan tidak berhasil. Secara parsial akan dijelaskan berdasarkan masing-masing dimensi yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan.

PERPANI Sumsel sebagai implementor sudah mematuhi ketentuan dari Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah. Namun belum adanya peraturan daerah pendukung kebijakan pembinaan prestasi atlet yang menjelaskan teknis dan kurikulum dari proses pembinaan prestasi tersebut sehingga masih mengikuti sebagai turunan dari PERMENPORA yang sifatnya umum. Tetapi secara keseluruhan Tingkat Kepatuhan dari Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Panahan di PERPANI Sumatera Selatan sudah dinilai baik dengan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Pembinaan prestasi atlet di PERPANI Sumsel pada pelaksanaan kegiatan rutinitas fungsi belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia yang seperti pelatih dan wasit yang berkompeten profesional dan bersertifikasi masih belum maksimal. Serta, terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kegiatan pembinaan prestasi agar perlu adanya peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah demi semakin lancarnya proses pembinaan prestasi terhadap atlet panahan Sumatera Selatan.

3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

Penilaian kinerja dan dampak yang timbul dalam Implementasi Pembinaan Prestasi Atlet Cabang Olahraga Panahan di PERPANI Sumsel adalah belum berjalan dengan baik. Ini bisa dilihat dari prestasi atlet panahan PERPANI Sumsel hanya mewakili satu atlet saja yang tampil di PON dan belum mendapatkan medali. Namun, diharapkan pada masa yang akan datang terus ditingkatkan kinerja dari para atlet dan juga kualitas para pelatih atau Pembina agar tercapainya tujuan untuk meraih prestasi tertinggi dan melahirkan atlet andalan di cabang olahraga panahan bagi putra dan putri daerah Sumatera Selatan.

Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Alet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Belum dibuatnya peraturan daerah pendukung untuk menjadi kurikulum dari proses pembinaan prestasi atlet tersebut sehingga masih mengikuti sebagai turunan dari PERMENPORA .
2. Keterbatasan anggaran dalam proses pembinaan prestasi, namun berkat kemauan yang keras dari PERPANI Sumsel sehingga mendapatkan dana dari pihak ke tiga atau sponsor.
3. Kondisi penyebaran virus Covid-19 berdampak proses pelaksanaan pencarian bibit atlet melalui pelaksanaan kompetisi dari awal tahun 2020 sampai awal 2022 menjadi terhambat karena adanya pembatasan aktivitas diberbagai sektor, termasuk sektor kegiatan olahraga.

Pada bagian ini, penulis selain menyampaikan kesimpulan, juga menyajikan beberapa saran terkait dengan kajian penelitian yang dilakukan terhadap Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Prestasi Alet Pada Cabang Olahraga Panahan di Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan.

Dibawah ini akan disampaikan beberapa saran berdasarkan temuan penelitian dan analisis data, yaitu:

1. Saran Teoritis

Saat ini, penelitian yang dilakukan terbatas pada studi implementasi tentang pembinaan prestasi atlet. Agar penelitian ini

lebih berkembang, maka diperlukan tindak lanjut dengan penelitian selanjutnya menggunakan analisis terbaru seperti pada indikator pembinaan prestasi atlet pada cabang olahraga sejenis atau organisasi lainnya.

2. Saran Praktis

- a. Penulis menyarankan kepada kepada Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan agar dapat menyediakan atau merumuskan kurikulum daerah untuk teknis pelaksanaan pembinaan prestasi atlet sehingga PERPANI Sumsel dapat lebih berfokus kepada pengembangan talenta atlet unggulan pada masing-masing daerah.
- b. Penulis menyarankan kepada Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan agar dapat meningkatkan kemampuan Sumber Daya Anggaran terutama pada pelaksanaan pembinaan prestasi atlet di Sumatera Selatan serta melakukan pengawasan dari internal dan eksternal agar terciptanya transparansi anggaran yang lebih baik dan komprehensif.

Penulis menyarankan kepada Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Provinsi Sumatera Selatan agar terus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan program pembinaan prestasi sehingga pada masa yang akan datang diharapkan akan lahir para atlet panahan asli Sumatera Selatan yang mampu mencetak prestasi yang baik serta dapat menjadi atlet unggulan Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Alfatih, Andy. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD PRESS.
- . (2017). *Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Palembang: UNSRI PRESS.
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Giriwijoyo, S. (2005). *Manusia dan Olahraga*. Bandung: Penerbit ITB.
- Harsuki. (2012). *Pengantar Manajemen Olahraga*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Husdarta. (2011). *Manajemen Pendidikan Jasmani*. Bandung : Alfabeta
- Kristiyanto, Agus. (2012). *Pembangunan Olahraga Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kejayaan Bangsa*. Surakarta: Yuma Pressindo.
- Kusmaedi, Nurlan. (2002). *Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional*. Bandung: FPOK UPI.
- Lionardo, Andries, dkk. (2021). *Peranan LITBANG Dalam Kebijakan Prestasi Olahraga*. Palembang: NoerFikri Offset
- Moleong, Lexy J. (1994). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Robbins, S.P and Tomoty A. Judge, (1996). *Organizational Behaviour*, Seventh Edition, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Roesdiyanto, dan Budiwanto, Setyo. (2008). *Dasar-dasar Kepelatihan Olahraga*. Malang: Laboratorium Olahraga Universitas Negeri Malang.
- Siagian, Sondang P. (2004). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Toho Cholik Mutohir, Ali Maksum. (2007). *Sport Development Index*. Jakarta. PT Indeks.
- Wahjoedi. (2001). *Landasan Evaluasi Pendidikan Jasmani*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MedPress

-----2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

-----2012. *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS